



PEMERINTAH
KABUPATEN
SLEMAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

2024



bkad.slemankab.go.id



bkad@slemankab.go.id



(0274) 866039



Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman





PEMERINTAH
KABUPATEN
SLEMAN

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN



2024

bkad.slemankab.go.id

bkad@slemankab.go.id

(0274) 866039

Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman



KATA PENGANTAR

- ✉ bkad@slemankab.go.id
- 🌐 bkad.slemankab.go.id
- 📍 Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024.

Laporan ini memuat realisasi capaian kinerja baik fisik maupun keuangan dan perubahan sarana pendukungnya yang perlu untuk disampaikan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2024. Laporan ini sekaligus sebagai bahan evaluasi dan umpan balik bagi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap karyawan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah berperan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Sleman, 31 Januari 2025
Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman

Dra. TINA HASTANI, M.M

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Dasar Pembentukan Perangkat Daerah.....	8
1.2 Urusan Pemerintahan Yang dilaksanakan	22
1.3 Anggaran dan Realisasi Keuangan	24
BAB II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	27
2. URUSAN KEUANGAN	27
2.1 Capaian Indikator Kinerja	27
2.1.1 Indikator Kinerja Daerah	27
2.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	31
2.1.3 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	36
2.1.3.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	36
2.1.3.2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	45
2.1.3.3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	55
2.1.3.4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	58
BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI	66
3.1 Indikator Kinerja Kunci	66
3.1.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) <i>Output</i>	66
3.1.2 Indikator Kinerja Kunci <i>Outcome</i>	66
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA KEISTIMEWAAN	71
BAB V TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2023	72
BAB VI PENUTUP	77
LAMPIRAN	78

Lampiran 1 Dokumen Pendukung Indikator Kunci	79
Lampiran 2 Laporan Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024	80
Lampiran 3 Data Inovasi BKAD	81
Lampiran 4 Data Prestasi BKAD	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BKAD berdasarkan Klasifikasi	22
Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024	24
Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah	27
Tabel 2.2 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kab Sleman Tahun 2020- 2024	31
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	32
Tabel 2.4 Capaian Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	65
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Pemerintahan Keuangan Tahun 2024 (Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil	69
Tabel 6.1 Realisasi Keuangan BKAD (sampai dengan bulan Desember 2024)	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah	19
Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Stadion Maguwoharjo	20
Gambar 1.3 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal	21
Gambar 2.1 Grafik Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	28
Gambar 2.2 Grafik Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Per Dimensi	30
Gambar 2.3 Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2020 s/d 2024	33
Gambar 2.4 Grafik Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 s/d 2024	34
Gambar 2.5 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Per Dimensi	35
Gambar 2.6 Sosialisasi Sistem Kerja Baru	40
Gambar 2.7 Ruang Pelayanan BKAD	43
Gambar 2.8 Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan RAPBD TA 2024.....	46
Gambar 2.9 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.....	51
Gambar 2.10 <i>High Level Meeting</i> Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.....	52
Gambar 2.11 Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	54
Gambar 2.12 Penyimpanan Barang Milik Daerah	57
Gambar 2.13 Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Evaluasi Capaian dan Konfirmasi Target Retribusi 2025	60
Gambar 2.14 Sosialisasi Penyelenggaraan Reklame	60
Gambar 2.15 Intensifikasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan	62

Gambar 2.16 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Jurusita Pajak Kabupaten Sleman	63
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1) dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

2) Fungsi

- a. Penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang keuangan.
- d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sleman berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.27 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat

a) Tugas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Sekretariat.
- b) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
- c) Pelaksanaan urusan umum.
- d) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- e) Pelaksanaan urusan keuangan.
- f) Pengoordinasian dan penyusunan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- g) Pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi.
- h) Pelaksanaan dan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- i) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
- j) Pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi, dan
- k) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Tugas

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d) Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan.
- e) Pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f) Pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, informasi dan pengaduan.

- g) Pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan;
- h) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan

- a) Tugas
Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
- b) Fungsi
 - a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan.
 - b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.
 - c) Pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - d) Pelaksanaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah.
 - e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan

- a. Tugas
Melaksanakan, membina, dan mengendalikan pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
- b. Fungsi
 - a) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.
 - b) Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
 - c) Pelaksanaan pendaftaran calon wajib pajak daerah.
 - d) Pelaksanaan pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi.
 - e) Pelaksanaan dan pemutakhiran basis data pajak daerah.

- f) Pelaksanaan penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- g) Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah.
- h) Pelaksanaan pengawasan wajib pajak daerah.
- i) Pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah.
- j) Pelaksanaan administrasi benda berharga.
- k) Pelaksanaan dan pembinaan penetapan pajak daerah.
- l) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan.

d. Bidang Penagihan dan Pengembangan

a. Tugas

Melaksanakan, membina, dan mengendalikan penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- c) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- d) Pelaksanaan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- e) Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pajak daerah
- f) Pelaksanaan pelayanan restitusi pajak daerah.
- g) Pelaksanaan pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak daerah.
- h) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pendapatan asli daerah.
- i) Pelaksanaan analisis dan pengembangan pendapatan asli daerah.
- j) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penagihan dan Pengembangan.

e. Bidang Perbendaharaan

a. Tugas

Melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan.
- b) Perumusan kebijakan teknis penatausahaan kuangan daerah.
- c) Pelaksanaan pengelolaan belanja daerah
- d) Pembinaan dan pengendalian penatausahaan belanja daerah
- e) Pelaksanaan penatausaahn kas daerah.
- f) Pelaksanaan pengendalian kas daerah.
- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Perbendaharaan.

f. Bidang Anggaran

a. Tugas

Melaksanakan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang anggaran.
- b) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian anggaran daerah.
- c) Analisis potensi sumber dana dan pembiayaan daerah.
- d) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan.
- e) Pelaksanaan pengelolaan investasi daerah.
- f) Pelaksanaan administrasi hibah dana daerah.
- g) Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h) Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran perangkat daerah.

- i) Penyusunan dokumen penyediaan dana dan anggaran kas.
- j) Penyusunan informasi penganggaran daerah.
- k) Penyusunan peraturan penganggaran daerah.
- l) Pelaksanaan pengendalian penganggaran daerah.
- m) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Anggaran

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a) Tugas

Melaksanakan dan membina akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- b) Perumusan kebijakan teknis akuntansi keuangan daerah dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Pelaksanaan akuntansi keuangan daerah.
- d) Pembinaan pelaksanaan akuntansi perangkat daerah.
- e) Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang milik daerah.
- f) Pelaksanaan evaluasi realisasi keuangan daerah.
- g) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah.
- h) Pembinaan pelaporan keuangan perangkat daerah.
- i) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

h. Bidang Aset

a) Tugas

Melaksanakan dan membina perencanaan dan pengadaan aset, pemanfaatan dan pengamanan aset dan penatausahaan dan pengendalian aset.

b) Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja bidang aset.

- b) Perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah.
- c) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- d) Pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- e) Penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah.
- f) Pengurusan status hukum barang daerah.
- g) Pelaksanaan pengamanan fisik barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- h) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah.
- i) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- j) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kewenangan.
- k) Pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
- l) Pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.
- m) Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- n) Pelaksanaan penilaian barang milik daerah.
- o) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Aset.

Unit Pelaksana Teknis Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

(1) UPTD Stadion Maguwoharjo

UPT Stadion Maguwoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pengelolaan Stadion Maguwoharjo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pengelolaan aset Stadion Maguwoharjo dan sarana olahraga lainnya.

b. Fungsi

- a) Penyusunan rencana kerja;
- b) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Stadion Maguwoharjo dan sarana olah raga lainnya;
- c) Pelayanan penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Klebengan, Gedung Olah Raga Pangukan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- d) pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- e) pelaksanaan usul rehab atau pembangunan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- f) pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- g) pelaksanaan keamanan internal sarana dan prasarana Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- h) pemasaran dan kerjasama penggunaan Stadion Maguwoharjo, Stadion Tridadi, Gedung Olah Raga Pangukan, Gedung Olah Raga Klebengan, Lapangan Tenis Tridadi, dan Lapangan Denggung;
- i) pelaksanaan ketatausahaan;
- j) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan

- k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPT Stadion Maguwoharjo terdiri dari:

1. Kepala UPTD

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
- h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
- i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.

- 3. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo sesuai dengan ketrampilan/keahlian.

(2) UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana

Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Keuangan dan Aset Daerah bidang pengelolaan dana penguatan modal.

b. Fungsi

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan teknis pengelolaan dana penguatan modal;
- c) pengoordinasian analisis, verifikasi, dan penetapan besaran dana penguatan modal;
- d) pelayanan informasi dana penguatan modal;
- e) pelaksanaan penyaluran dana penguatan modal;
- f) pelaksanaan administrasi, pembukuan dan pelaporan penyaluran dana penguatan modal;
- g) pengoordinasian dan pelaksanaan penagihan dana penguatan modal;
- h) pelaksanaan ketatausahaan;
- i) evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kerja; dan
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal terdiri dari:

a. Kepala UPTD

b. Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas:

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan dan evaluasi.

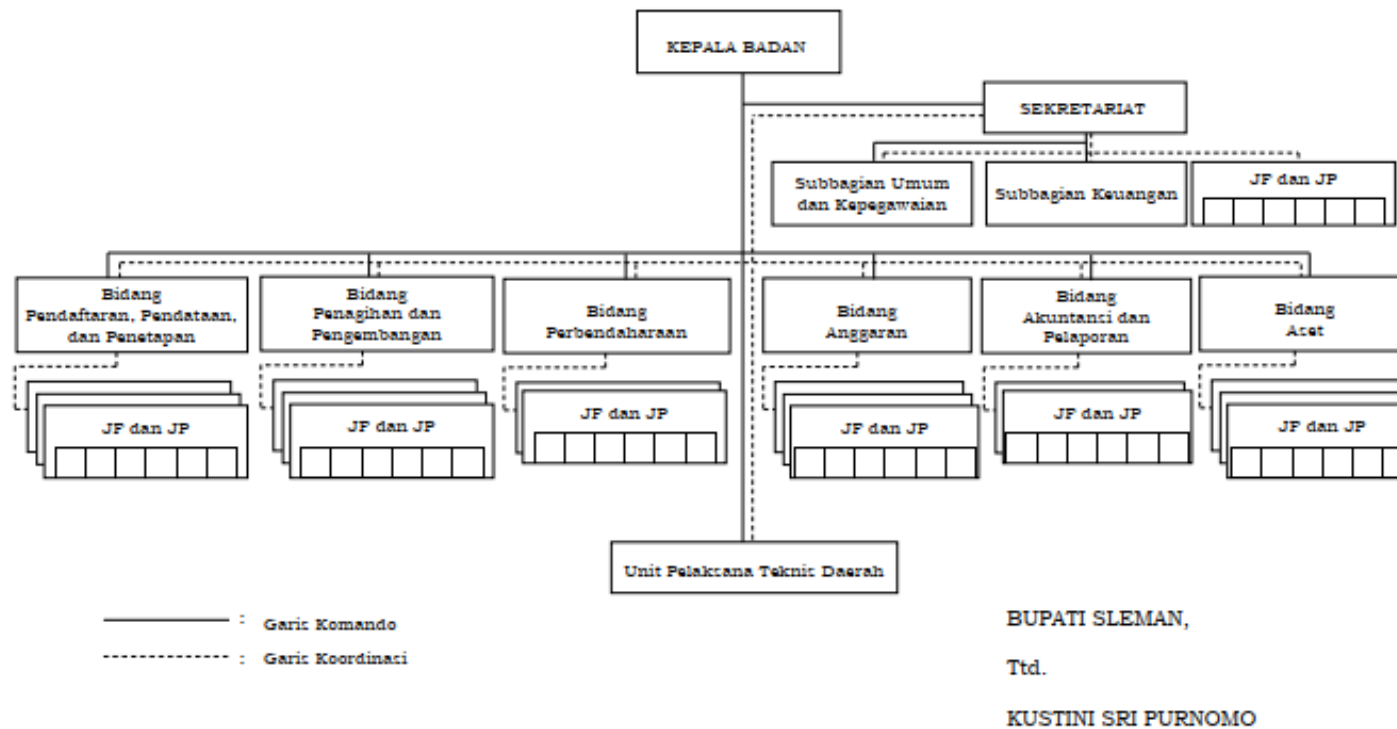
Fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b) perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c) pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
- d) penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;

- e) pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - f) pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
 - g) pengoordinasian penyusunan rencana kerja UPTD;
 - h) pengoordinasian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
 - i) evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Tata Usaha.
- c. **Kelompok Jabatan Fungsional** melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal sesuai dengan keahlian.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN

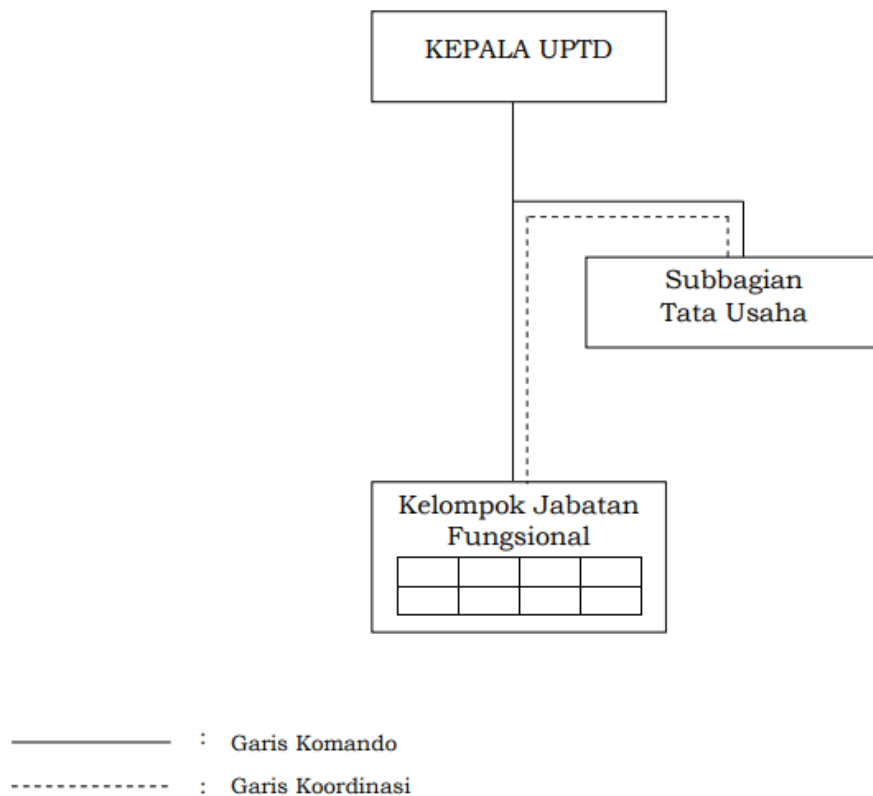
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 38.25 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO

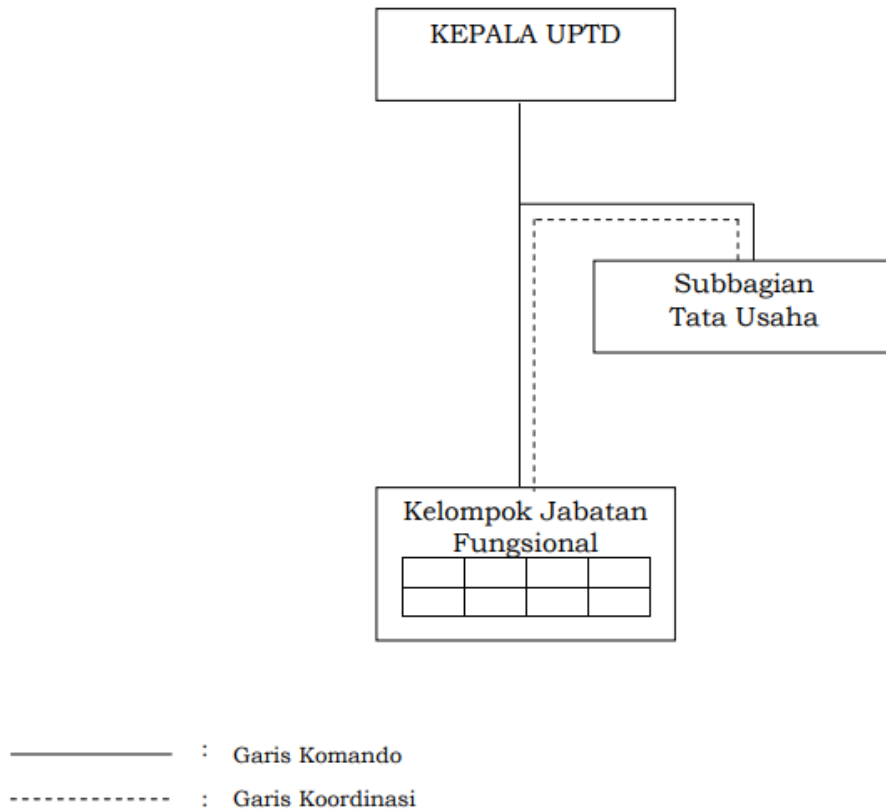
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN STADION MAGUWO HARJO



Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Stadion Maguwoharjo

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 38.24 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL



Gambar 1.3 Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Penguatan Modal

Pelaksana tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh sumberdaya manusia / pegawai dengan klasifikasi yang beragam mulai jenis kelamin, pangkat / golongan dan jenjang pendidikan dan diklat yang pernah ditempuh.

Tabel 1.1 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BKAD Berdasarkan Klasifikasi

No.	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN						Total		Total ASN Keseluruhan
		Struktural		Fungsional		Pelaksana				
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	5	9	5	11	29	25	39	45	83

1.2 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa badan daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Unsur penunjang sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 diantaranya meliputi urusan keuangan. Selaku perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya adalah urusan keuangan. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnya menurut asas otonomi dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat didaerahnya pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum.

Pasal 283 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat 1 mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

1.3 ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset didukung dana APBD Kabupaten Sleman tahun 2024 yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan keuangan adalah sebesar Rp 617.401.331.549,00 sedangkan realisasi adalah sebesar Rp 593.564.299.616,00. Sejumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan urusan keuangan yang dijabarkan dalam 4 (empat) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 65 (enam puluh lima) sub kegiatan.

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun 2024 berdasarkan rekening tersaji pada tabel 1.2. Sedangkan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2023 dikelompokkan berdasar belanja per sub kegiatan disajikan pada lampiran 2.

Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Per Rekening)

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
4	Pendapatan Daerah				
41	Pendapatan Asli Daerah	957.255.202.269,00	914.988.433.153,91	42.266.769.115,09	95,58
4101	Pajak Daerah	869.022.775.000,00	851.515.175.943,00	17.507.599.057	97,99
4102	Retribusi Daerah	837.225.000,00	1.865.357.925,00	(1.028.132.925)	221,73
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.893.103.269,00	43.658.935.550,82	(765.832.281,82)	101,79
4104	Lain-lain PAD yang Sah	44.502.099.000,00	17.957.963.735,09	26.544.135.264,91	40,35
42	Pendapatan Transfer	2.023.918.332.763,00	2.045.605.697.714,77	(21.687.364.951,77)	101,07
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.687.840.643.284	1.699.678.557.910	(11.837.914.626)	100,70
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	336.077.689.479,00	345.927.139.804,77	(9.849.450.325,77)	102,93
43	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	127.854.262	98,50
4301	Pendapatan Hibah	8.519.307.535,00	8.391.453.273,00	127.854.262	98,50
4302	Dana Darurat	0	0	0	0
4303	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	2.989.692.842.567,00	2.968.985.584.141,68	20.707.258.425,32	99,31

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
5	Belanja Daerah				
51	Belanja Operasi	115.575.240.929,00	111.058.863.062,61	4.516.377.866,39	96,09
5101	Belanja Pegawai	35.514.845.001,00	33.612.384.535,15	1.902.460.465,85	94,64
5102	Belanja Barang dan Jasa	80.060.386.928,00	77.446.478.527,46	2.613.908.400,54	96,74
5103	Belanja Bunga	0	0	0	0,00
5104	Belanja Subsidi	0	0	0	0,00
5105	Belanja Hibah	0	0	0	0,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
52	Belanja Modal	9.696.741.150,00	9.235.852.708,80	460.888.441,2	95,25
5201	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.278.121.150,00	8.832.858.376,11	445.262.773,89	95,20
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.000.000,00	101.681.332,69	8.318.667,31	92,44
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0	0
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	308.620.000,00	301.313.000,00	7.307.000	97,63
53	Belanja Tidak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	5.746.496.461	71,15
5301	Belanja Tidak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	5.746.496.461	71,15
54	Belanja Transfer	492.856.489.702,00	489.742.951.235,00	3.113.538.467	99,37
5401	Belanja Bagi Hasil	94.871.425.409,00	92.238.047.023,00	2.633.378.386	97,22
5402	Belanja Bantuan Keuangan	397.985.064.293,00	397.101.207.602,00	883.856.691	99,88
	Jumlah Belanja	638.044.093.942,00	624.206.792.706,41	13.837.301.235,59	97,83
	Surplus/(Defisit)	2.351.648.748.625,00	2.233.004.852.626,86	53.357.291.022,86	102,45
6	Pembiayaan Daerah				
61	Penerimaan Pembiayaan	231.942.509.862,00	231.942.509.862,00	0	100
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	231.942.509.862,00	231.942.509.862,00	0	100,00
	Jumlah Penerimaan	231.942.509.862,00	231.942.509.862,00	0	100,00
62	Pengeluaran Pembiayaan	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00		

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/(Kurang)	%
		Anggaran	Realisasi		
6201	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	
6202	Penyertaan Modal Daerah	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	0	100,00
	Jumlah Pengeluaran	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	0	100,00
	Pembiayaan Netto	202.842.509.862,00	202.842.509.862,00	0	100,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	2.554.491.258.487,00	2.547.621.301.297,02	6.869.957.189,98	99,73

BAB II

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

2. URUSAN KEUANGAN

2.1 Capaian Indikator Kinerja

Penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai perlu dilakukan oleh organisasi dengan melakukan pengukuran atas kinerjanya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKAD. Terdapat dua indikator yaitu indikator kinerja daerah dan indikator kinerja perangkat daerah.

2.1.1 Indikator Kinerja Daerah

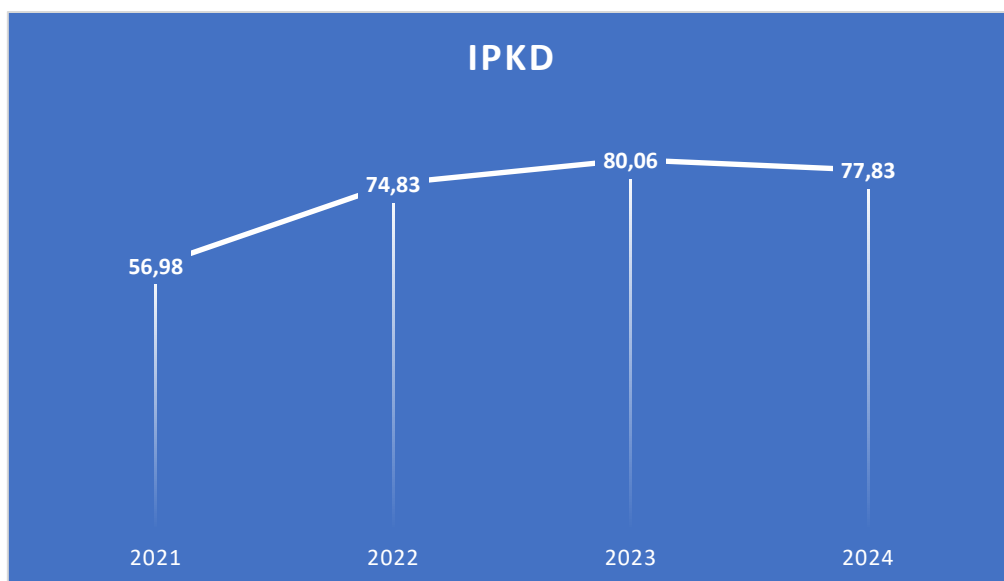
Berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 Indikator Kinerja Daerah yang diampu BKAD yaitu Indek Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Berikut adalah capaian indikator kinerja daerah yang diampu BKAD.

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	2024			
						Target Awal	Target Perubahan	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B 56,98	B 74,83	A (80,06)	B	A	B (77,83)	97,28

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Indeks pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Disamping itu pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dilakukan oleh pemerintah propinsi. Capaian indikator indeks pengelolaan keuangan daerah adalah pengukuran atas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan pengukurannya pada tahun 2024 atas pengelolaan keuangan tahun 2023.



Gambar 2.1 Grafik Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdapat 6 (enam) dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah. Keenam dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a) Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran, pengukuran dilakukan pada kesesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan RKPD.

Selanjutnya nomenklatur RKPD dan KUA PPAS dan KUA PPAS dengan

APBD. Sedangkan kesesuaian pagu program pada RKPD dan KUA PPAS, dilanjutkan KUA PPAS dengan APBD.

b) Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20%, untuk fungsi Kesehatan sebesar minimal 10% diluar gaji dan minimal 25% untuk infrastruktur dari dana transfer serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

c) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada dimensi ini pemerintah daerah dituntut ketepatan waktu dan keteraksesannya dalam mempublikasikan dokumen-dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Miliik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 29 (dua puluh Sembilan) jenis dokumen yang harus dipublikasikan mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran baik itu pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas pemerintah daerah dan opini BPK.

d) Penyerapaan Anggaran

Dimensi penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapatn atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.

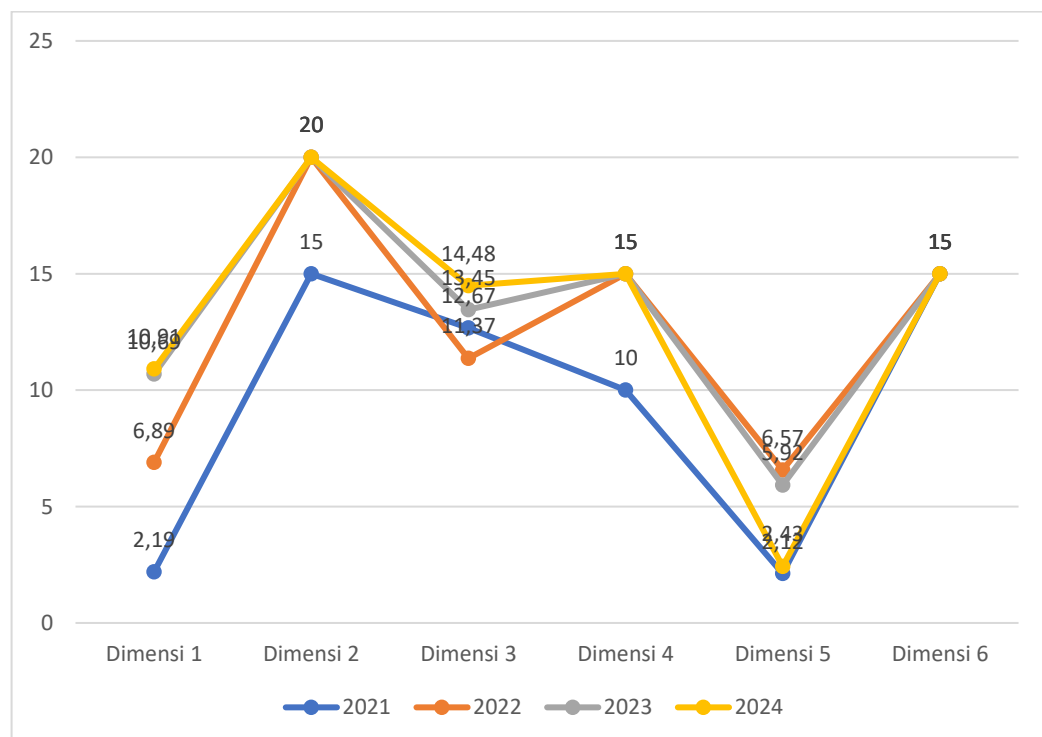
e) Kondisi Keuangan Daerah

Dimensi ini mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif. Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari 6 (enam) indicator pembentuk kondisi keuangan daerah. Keenam indikator tersebut adalah a) kemampuan keuangan daerah, b) fleksibilitas keuangan, c) solvabilitas operasional, d) solvabilitas jangka pendek, e) solvabilitas jangka panjang dan f) solvabilitas layanan. Dari hasil pengkuruan indikator diperoleh.

f) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD

Pada dimensi ini, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pengukuran adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan pada keseluruhan dimensi kecuali dimensi 5 (lima) yang mengukur kondisi keuangan daerah. Pada dimensi 5 (lima) terdapat 6 (enam) indikator yang diukur. Penurunan terjadi pada *ratio* fleksibilitas keuangan dan *ratio* solvabilitas jangka pendek. *Ratio* fleksibilitas keuangan dipengaruhi oleh total pendapatan daerah, penerimaan dana alokasi khusus, total kewajiban dan belanja pegawai. Sedangkan *ratio* solvabilitas jangka pendek dipengaruhi oleh saldo kas dan setara kas, investasi jangka pendek dan kewajiban jangka pendek.



Gambar 2.2 Grafik Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Per Dimensi

Adapun capaian indikator urusan keuangan Kabupaten Sleman tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap realisasi APBD	14,35	16,41%	9,39	7,44	4,67
3	Persentase SILPA terhadap APBD	12,81	14,54	8,67	7,06	4,47
4	Jumlah program tidak dilaksanakan	0	0	0	1	1
5	Jumlah kegiatan tidak dilaksanakan	0	0	0	3	1
6	Persentase belanja pendidikan (%)	25,78	28,89	29,20	26,81	28,35
7	Persentase belanja Kesehatan (%)	12,78	19,36	16,40	16,45	17,76
8	Persentase belanja langsung	46,21	45,72	44,72	41,74	39,55
9	Persentase belanja tidak langsung	53,79	54,21	55,28	58,26	60,45
10	Persentase belanja bagi hasil kabupaten/desa (%)	2,22	8,06	2,68	2,58	2,81

Sumber data LKPD *unaudited*

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Opini WTP tersebut telah didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman secara berturut-turut sejak tahun 2011. Opini Wajar Tanpa Pengecualian diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman 14 (empat belas) kali berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki.

2.1.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Instrumen indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja dan capaian Badan Keuangan dan Aset Daerah pada 3 (tiga) terakhir yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	B	A (80,06)	A	B	97,28
2	Predikat AKIP	Predikat	BB (76,95)	A (84)	A (84)	A (84)	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,03	84,94	84,54	85,43	101,05

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Indeks pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Disamping itu pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dilakukan oleh pemerintah propinsi. Terdapat 6 (enam) dimensi yang digunakan untuk mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah. Keenam dimensi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada dimensi ini kesesuaian diukur dari kesesuaian antara dokumen perencanaan dan anggaran. Mulai dari dokumen RPJMD dinilai kesesuaian nomenklatur programnya dengan dokumen RKPD. Dokumen RKPD dinilai kesesuaiannya dengan dokumen KUA PPAS. Dokumen KUA PPAS dinilai kesesuaian nomenklatur dan pagunya dengan dokumen APBD.

2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

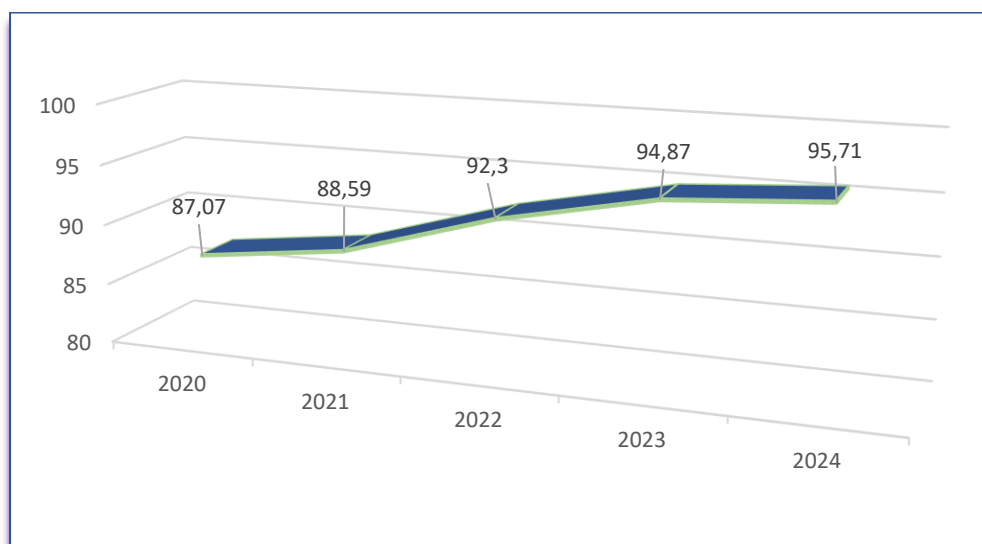
Pada dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20%, untuk fungsi Kesehatan minimal sebesar 10% diluar gaji dan serta alokasi untuk infrastruktur dari dana transfer serta alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada dimensi ini pemerintah daerah dituntut ketepatan waktu dan keteraksesannya dalam mempublikasikan dokumen-dokumen produk dari pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun, termasuk pula laporan keuangan dari Badan Usaha Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat 29 (dua puluh Sembilan) jenis dokumen yang harus dipublikasikan mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran baik itu pemerintah daerah maupun perangkat daerah, dokumen rencana umum pengadaan, dokumen laporan keuangan pemerintah daerah maupun perangkat daerah, laporan akuntabilitas pemerintah daerah dan opini BPK.

4. Penyerapan Anggaran

Dimensi penyerapan anggaran mencakup indikator sebagaimana struktur pada APBD yaitu penyerapan atas anggaran belanja operasional, penyerapan atas belanja modal, penyerapan atas belanja tidak terduga dan penyerapan atas belanja transfer.

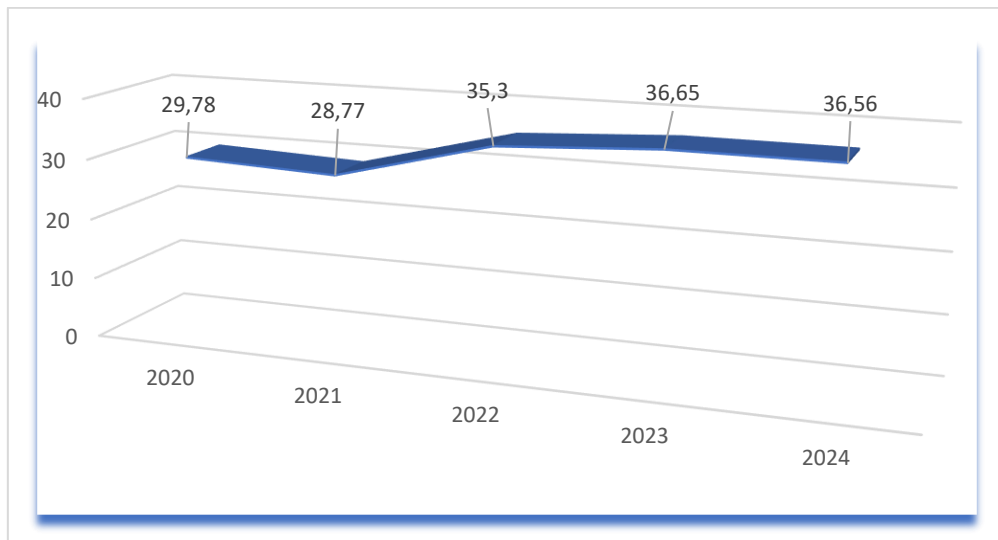


Gambar 2.3 Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2020 s/d 2024

5. Kondisi Keuangan Daerah

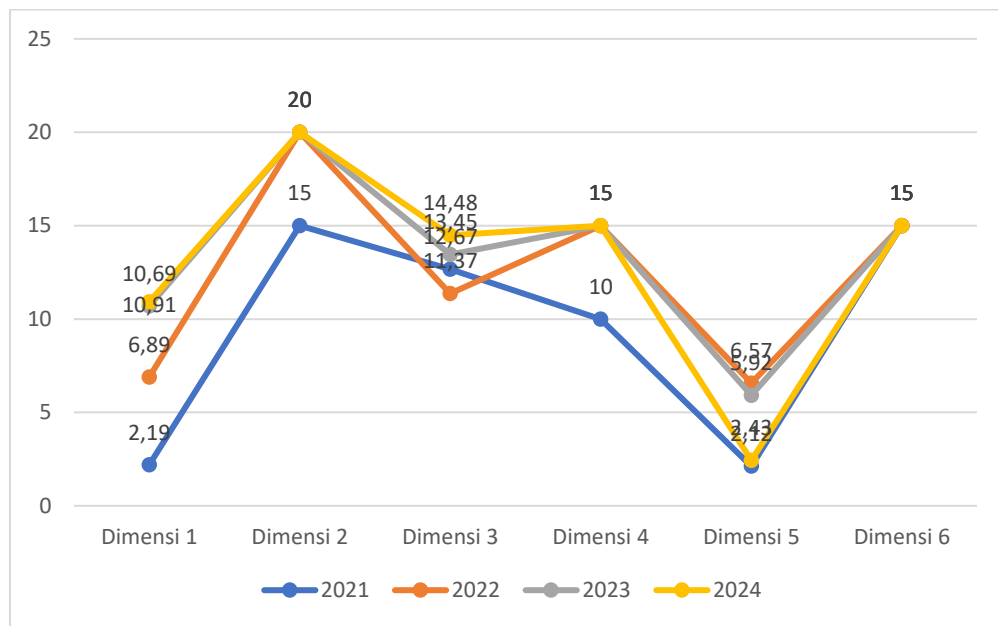
Dimensi ini mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi secara efisien dan efektif. Indeks dimensi kondisi keuangan daerah dilihat dari 6 (enam) indikator pembentuk kondisi keuangan daerah. Keenam indikator tersebut adalah:

a) Kemampuan keuangan daerah



Gambar 2.4 Grafik Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2020 s/d 2024

- b) Fleksibilitas keuangan
 - c) Solvabilitas operasional
 - d) Solvabilitas jangka pendek
 - e) Solvabilitas jangka panjang dan
 - f) Solvabilitas layanan.
- ## 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD
- Pada dimensi ini, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menjadi pengukuran adalah diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.



Gambar 2.5 Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Per Dimensi

Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya kenaikan pada keseluruhan dimensi kecuali dimensi 5 (lima) yang mengukur kondisi keuangan daerah. Pada dimensi 5 (lima) terdapat 6 (enam) indikator yang diukur. Penurunan terjadi pada ratio solvabilitas jangka pendek. Ratio solvabilitas jangka pendek diperoleh dengan cara menghitung saldo kas dan setara kas (SiLPA) ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Pada tahun yang diukur dan tahun sebelumnya tidak ada investasi jangka pendek, sehingga ratio hanya dipengaruhi oleh jumlah kas dan setara kas (SiLPA) dan jumlah kewajiban jangka pendek. Terjadi penurunan jumlah kas dan setara kas (SiLPA) pada tahun pengukuran, sedangkan jumlah kewajiban jangka pendek sebagai faktor pembagi mengalami kenaikan, sehingga diperoleh ratio solvabilitas jangka pendek yang menurun dibanding tahun sebelumnya.

Capaian indikator indeks kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil *survey* kepada pengguna jasa di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah baik di sekretariat maupun di 6 (enam) bidang. Responden dipilih secara acak (*random sampling* yang ditentukan dengan cakupan jenis pelayanan masing-masing unit pelayanan publik pada bidang-bidang dan sekretariat BKAD. *Survey* Kepuasan

Masyarakat di lingkungan BKAD dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) jenis kuisioner yaitu kuisioner *standard* dan kuisioner rapat. *Survey* dilaksanakan tiap semester pada tiap-tiap unit layanan. Pada semester pertama tahun 2024 atas pelayanan kepada pengguna jasa BKAD diperoleh indeks sebesar 86,12. Sedangkan dari hasil *survey* semester 2 (dua) diperoleh hasil indeks sebesar 84,75. Dari kedua hasil *survey* tersebut kemudian dijumlah dan dibagi 2 (dua) untuk menentukan indeks IKM BKAD dan diperoleh indeks sebesar 85,43 tercapai sebesar 101,05%.

Predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah predikat yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman. Dalam melakukan evaluasi atas LKjIP perangkat daerah, Inspektorat Kabupaten Sleman mendasarkan pada aturan dari Kementerian PAN RB atas Laporan Kinerja Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Atas penilaian yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Sleman, LKjIP BKAD memperoleh nilai sebesar 84. Nilai tersebut masuk dalam kategori A. Sedangkan target yang tercantum pada renstra adalah A dengan nilai 84. Nilai tersebut merupakan hasil evaluasi atas LKjIP tahun 2023 yang dilakukan penilaiannya pada tahun 2024.

2.1.3 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

2.1.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Program Penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh sekretariat BKAD, didukung 5 (lima) kegiatan. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini adalah sebesar 95.269.807.650,00 terealisasi sebesar Rp 91.770.447.742,01 atau 96,32%.

Indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota ada 2 (dua) yaitu persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja dan persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari perhitungan terpenuhinya pelayanan sarana dan prasarana kerja, baik pengadaannya maupun pemeliharaan atas sarana dan

prasarana. Sarana dan prasarana kerja meliputi gedung kantor, kendaraan dinas serta perlengkapan dan peralatan kantor. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi diperoleh dari perhitungan terpenuhinya layanan administrasi perkantoran BKAD. Administrasi perkantoran terdiri dari layanan administrasi keuangan, layanan makan dan minum rapat, layanan koordinasi dan konsultasi, layanan langganan, layanan jasa keamanan dan kebersihan, layanan administrasi kepegawaian dan pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKAD.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu. Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 60.273.935,00 terealisasi sebesar Rp 59.339.923,00 atau sebesar 98,45%.

Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini dihitung jumlah dokumen yang disusun tepat waktu pada tahun 2024. Dokumen yang harus disusun terdiri dari dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi. Dokumen perencanaan terdiri dari dokumen perubahan rencana kerja tahun 2024 dan dokumen rencana kerja tahun 2025. Dokumen penganggaran terdiri dari dokumen perubahan rencana kegiatan (RKA Perubahan) anggaran tahun 2024, dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahun (RKA) tahun 2025, dokumen perubahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA Perubahan) tahun 2024 dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2025. Dokumen evaluasi terdiri dari laporan bulanan tahun 2024, laporan tahunan tahun 2023 dan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun 2024.

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah didukung 6 (enam) sub kegiatan. Keenam sub kegiatan yang mendukung kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 43.343.720,00 realisasi Rp43.047.995,00 (99,31%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah, terealisasi 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah (100 %).
- **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.762.440,00 realisasi Rp 1.736.143,00 (98,50%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA -SKPD, terealisasi 1 (satu) dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (100%)
- **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.091.600,00 realisasi Rp 2.002.912,00 (95,75%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD, terealisasi 1 (satu) dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (100%)
- **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA – SKPD**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.349.900,00 realisasi Rp 2.315.355,00 (98,52%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD, terealisasi 1 (satu) dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (100%)
- **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA – SKPD**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.274.900,00 realisasi Rp 1.950.181,00 (85,72%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD, terealisasi 1 (satu) dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD (100%)

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.451.375,00 realisasi Rp 8.347,337,00 (98,76%), sedangkan target output adalah 7 (tujuh) laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, terealisasi 7 (tujuh) laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (100%).

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah prosentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan semesteran dan laporan Barang Milik Daerah semesteran. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 35.556.557.201,00 terealisasi sebesar Rp 33.650.957.424,15 atau sebesar 94,64% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 34.889.834.001,00 realisasi Rp 33.045.124.535,15 (94,71%), sedangkan target output adalah 90 (sembilan puluh) orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN, terealisasi 90 (sembilan puluh) orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (100%)

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 582.360.000,00 realisasi Rp 552.440.000,00 (94,86%), sedangkan target output adalah 3 (tiga) dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, terealisasi 3 (tiga) dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 84.363.200,00 realisasi Rp 83.392.889,00 (98,84%), sedangkan target output adalah 5 (lima) laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD, terealisasi 5 (lima) laporan keuangan bulanan /

triwulanan / semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD (100%).

c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Adapun total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.169.573.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.006.439.931,06 atau sebesar 86,05%.

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Lokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terealisasi dari sub kegiatan dapat dilihat di lampiran 2.



Gambar 2.6 Sosialisasi Sistem Kerja Baru

d. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum dengan target 90% dan terealisasi sebesar 90% sehingga capaian 100%. Administrasi umum terdiri dari:

- 1) penyediaan komponen listrik
- 2) penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 3) fasilitasi tamu dan perjalanan dinas
- 4) kebutuhan lainnya

Adapun total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.512.972.100,00 terealisasi sebesar Rp 2.065.109.895,00 atau sebesar 82,17% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah didukung dengan 6 (enam) sub kegiatan. Keenam sub kegiatan yang mendukung kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 78.087.600,00 realisasi Rp 57.974.930,00 (74,24%), sedangkan target output adalah 6 (enam) paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan, terealisasi 6 (enam) paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan (100%)
- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 636.301.500,00 realisasi Rp 575.954.307,00 (90,51%), sedangkan target output adalah 1 (satu) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, terealisasi 1 (satu) paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (100%)
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 755.627.000,00 realisasi Rp 645.051.483,00 (85,36%), sedangkan target output adalah 1 (satu) paket bahan logistik kantor yang disediakan, terealisasi 1 (satu) paket bahan logistik kantor yang disediakan (100%)
- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 350.000.000,00 realisasi Rp 229.314.382,00 (65,51%), sedangkan target output adalah 1 (satu) paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan, terealisasi 1 (satu) paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan (100%).
- **Fasilitasi Kunjungan Tamu**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 91.518.000,00 realisasi Rp 89.175.890,00 (97,44%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan fasilitasi kunjungan tamu, terealisasi 12 (dua belas) laporan fasilitasi kunjungan tamu (100%).

- Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 601.438.000,00 realisasi Rp 467.639.003,00 (77,75%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, terealisasi 12 (dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd (100%).

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja dengan target 90% terealisasi sebesar 90% sehingga capaian 100%. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.129.636.450,00 terealisasi sebesar Rp 7.751.489.698,00 atau sebesar 95,34% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan. Kedua sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 8.129.636.450,00 realisasi Rp 7.751.489.698,00 (95,34%), sedangkan target output adalah 14 (empat belas) unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan, terealisasi 14 (empat belas) jenis unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (100%)

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Penunjang pelaksanaan tugas terdiri dari layanan surat menyurat, layanan penyediaan jasa langganan, layanan keamanan dan kebersihan kantor dan layanan umum lainnya. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 45.636.337.064,00 terealisasi sebesar Rp 45.313.769.735,00 atau sebesar 99,29% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang mendukung kegiatan pemeliharaan baran milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 126.000.000,00 realisasi Rp 118.001.195,00 (93,65%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa surat menyurat, terealisasi 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa surat menyurat (100%)

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 45.009.462.064,00 realisasi Rp 44.709.721.546,00 (99,33%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan terealisasi 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (100%)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 500.875.000,00 realisasi Rp 486.046.994,00 (97,03%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan, terealisasi 12 (dua belas) laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (100%)



Gambar 2.7 Ruang Pelayanan BKAD

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase barang milik daerah terpelihara terealisasi sebesar 90% dari target 90% sehingga capaian 100%. Barang milik daerah terdiri dari kendaraan dinas, peralatan dan mesin, mebelair, gedung

kantor dan barang milik daerah lainnya. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.580.457.900,00 terealisasi sebesar Rp 1.299.433.625,80 atau sebesar 82,21% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan ini didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Ketiga sub kegiatan yang mendukung kegiatan pemeliharaan baran milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 609.312.000,00 realisasi Rp 415.170.976,00 (68,13%), sedangkan target output adalah 37 (tiga puluh tujuh) kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya, terealisasi 37 (tiga puluh tujuh) unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (100%)

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 195.550.000,00 realisasi Rp 146.319.756,00 (74,82%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, terealisasi 12 unit (dua belas) peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (100%)

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 775.595.900,00 realisasi Rp 737.942.893,00 (95,14%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi, terealisasi 12 unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi (100%)

h. Pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD

Indikator kinerja adalah persentase pemenuhan layanan BLUD terealisasi sebesar 98% dari target sebesar 100%. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp624.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 623.847.510,00 atau sebesar 99,97% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan. Alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terealisasi sebagaimana ditampilkan pada lampiran 2.

2.1.3.2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah memiliki 4 (empat) indikator yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang dan sekretariat melalui 4 (empat) kegiatan. Keempat indikator tersebut adalah:

1. persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dan penyusunan perencanaan anggaran daerah oleh bidang anggaran
2. persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah melalui kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah oleh bidang perbendaharaan
3. persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD melalui kegiatan koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah oleh bidang akuntansi, dan
4. persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan melalui kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah oleh sekretariat.

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar Rp 516.715.147.337,00 terealisasi sebesar Rp 507.583.341.429,00 atau sebesar 98,23%. Program pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini indikator kinerjanya adalah persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dokumen anggaran terdiri dari KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), KUPA PPAS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara), Raperda APBD dan Raperda PAPBD.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyerahan dokumen KUA

PPAS kepada DPRD paling lambat minggu ke 2 (dua) bulan Juli. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kesepakatan terhadap rancangan KUA PPAS Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025 ditandatangani oleh Bupati Sleman dan Pimpinan DPRD pada tanggal 9 Juli 2024.

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Sedangkan penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Rancangan Perda APBD Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2025 dan rancangan perbup tentang penjabaran APBD ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.



Gambar 2.8 Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan RAPBD TA 2024

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.324.045.800,00 terealisasi sebesar Rp 2.103.023.215,00 atau sebesar 90,48% dari total anggaran yang dialokasikan. Kelima sub kegiatan yang

mendukung kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 115.229.400,00 realisasi Rp 91.050.464,00 (79,01%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen KUA dan PPAS yang disusun, terealisasi 2 (dua) dokumen KUA dan PPAS yang disusun (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 68.196.000,00 realisasi Rp 35.700.765,00 (52,35%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun, terealisasi 2 (dua) dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun (100%).

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.405.000,00 realisasi Rp 12.096.750,00 (97,51%), sedangkan target output adalah 75 (tujuh puluh lima) RKA SKPD yang diverifikasi, terealisasi 75 (tujuh puluh lima) dokumen RKA SKPD yang diverifikasi (100%)

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 12.405.000,00 realisasi Rp 11.284.500,00 (90,96%), sedangkan target output adalah 75 (tujuh puluh lima) RKA SKPD yang diverifikasi, terealisasi 75 (tujuh puluh lima) dokumen RKA SKPD yang diverifikasi (100%)

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 31.950.000,00 realisasi Rp 28.445.011,00 (89,02%), sedangkan target output adalah 75 (tujuh puluh lima) DPA di verifikasi, terealisasi 75 (tujuh puluh lima) dokumen DPA SKPD yang diverifikasi (100%)

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 17.823.000,00 realisasi Rp 15.593.419,00 (87,49%), sedangkan target output adalah 75 (tujuh puluh lima) DPA perubahan di verifikasi, terealisasi 75 (tujuh puluh) dokumen Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 1.315.806.200,00 realisasi Rp 1.297.851.097,00 (98,63%), sedangkan target output adalah 2 (dua) peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, terealisasi 2 (dua) dokumen peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 130.155.700,00 realisasi Rp 128.666.107,00 (98,88%), sedangkan target output adalah 2 (dua) peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, terealisasi 2 (dua) dokumen peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 620.075.500,00 realisasi Rp 482.335.102,00 (77,78%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran, terealisasi 2 (dua) dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran (100%)

a. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Salah satu fungsi BKAD adalah sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) yang tugas utamanya adalah menyediakan dan melakukan pencairan dana atas beban rekening kas daerah sebagaimana diminta oleh Pengguna Anggaran. Penyediaan dana sudah mengacu rencana penyediaan tercantum dalam anggaran kas. Tingkat keberhasilan kinerja diukur dengan ketepatan waktu pencairan dan penatausahaan keuangan daerah. Dalam hal penatausahaan keuangan daerah termasuk pula mengatur ketersediaan dana sebagaimana diminta oleh pengguna anggaran, untuk keperluan belanja baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kebutuhan. BUD sudah

menjalankan fungsi penyediaan dana sesuai rencana/kebutuhan. Pelaksanaan fungsi ini dapat dilihat dari data penerbitan SP2D selama tahun 2024 yang tepat waktu. Selama tahun 2024 telah terbit SP2D sebanyak 9.763 SP2D dengan nilai pencairan Rp 3.109.161.000.283,84. Dalam penatausahaan keuangan daerah BKAD berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan teknologi yang ada sehingga administrasi penatausahaan keuangan daerah lebih cepat dan lebih valid. Sistem Informasi Keuangan Daerah telah mengakomodir kebutuhan penatausahaan keuangan daerah yang secara *online* terhubung dengan Bank Kasda. BKAD selaku BUD telah memanfaatkan tanda tangan elektronik tersebut untuk penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) *online* sehingga SP2D terbit tepat waktu sesuai dengan peraturan yaitu maksimal 2 (dua) hari.

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Penatausahaan keuangan meliputi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pengelolaan dana daerah. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 802.685.724,00 terealisasi sebesar Rp 779.623.612,00 atau sebesar 97,12% dari total anggaran yang dialokasikan.

Kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah didukung dengan 7 (tujuh) sub kegiatan. Ketujuh sub kegiatan yang mendukung kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah adalah sebagai berikut:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 87.291.000,00 realisasi Rp 86.370.150,00 (98,94%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah, terealisasi 12 (dua belas) dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah (100%)

- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 207.249.150,00 realisasi Rp 197.052.867,00 (95,08%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen hasil pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD,

teralisasi 2 (dua) dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD (100%)

- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 72.890.900,00 realisasi Rp 70.447.593,00 (96,64%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, terealisasi 12 (dua belas) dokumen hasil koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana tranfer lainnya (100%)

- Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 259.624.674,00 realisasi Rp 255.192.700,00 (98,29%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) dokumen hasil kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, terealisasi 12 (dua belas) dokumen hasil kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 46.130.000,00 realisasi Rp 45.380.938,00 (98,37%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Laporaan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga dan laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran, terealisasi 12 (dua belas) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Laporaan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga dan

laporan hasil koordinasi dalam rangka penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran (100%)



Gambar 2.9 Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Penyetoran Pajak Pusat atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman

- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 129.500.000,00 realisasi Rp 125.179.364,00 (96,66%), sedangkan target output adalah 1 (satu) dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait, terealisasi 1 (satu) dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait (100%)



Gambar 2.10 High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

- b. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD terealisasi sebesar 100 persen dari target 100%. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Perhitungan indikator pada tahun 2024 adalah untuk mengukur penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2023 ditetapkan tanggal 3 Juni 2024.
- Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 768.763.950,00 terealisasi sebesar Rp 755.907.407,00 atau sebesar 98,23% dari total anggaran yang dialokasikan.
- Kegiatan ini didukung dengan 4 (empat) sub kegiatan yang masing-masing alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output sebagai berikut:
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp74.733.000,00 realisasi Rp 71.293.350,00 (95,39%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, terealisasi 1 (satu) laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah (100%)

- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 512.411.550,00 realisasi Rp 504.324.587,00 (98,42%), sedangkan target output adalah 1 (satu) rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota, terealisasi 1 (satu) dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (100%)

- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 170.987.400,00 realisasi Rp 170.146,920,00 (99,50%), sedangkan target output adalah 1 (satu) kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah terealisasi 1 (satu) dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah (100%)

- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 10.632.000,00 realisasi Rp 10.142.550,00 (95,39%), sedangkan target output adalah 50 (lima puluh) orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota, terealisasi 50 (lima

puluh) orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten (100%).



Gambar 2.11 Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase ketepatan waktu penyaluran keuangan penunjang urusan keuangan terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Dari total anggaran yang dikelola BKAD sebanyak 79,99% teralokasi untuk kegiatan ini. Jenis belanja yang dikelola pada kegiatan ini adalah belanja tidak terduga dan belanja transfer kepada pemerintah Desa. Hal ini mengingat fungsi BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menjadi lalu lintas uang masuk dan keluar. Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 512.819.651.863,00 terealisasi sebesar Rp 503.994.787.195,00 atau sebesar 98,27%.

Kegiatan Didukung dengan 4 (empat) sub kegiatan. Keempat sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Analisis Investasi Pemerintah Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 47.540.000,00 realisasi Rp 32.710.260,00 (68,80%), sedangkan target output adalah 3 (tiga) Laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah, terealisasi 3 (tiga) Laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (100%)

- **Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 397.985.064.293,00 realisasi Rp 397.504.904.212,00 (99,87%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan, terealisasi 1 (satu) laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan (100%)
- **Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 19.915.622.161,00 realisasi Rp 14.169.125.700,00 (71,14%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak, terealisasi 1 (satu) laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak (100%)
- **Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 94.871.425.409,00 realisasi Rp 92.238,047.023.00 (97,22%), sedangkan target output adalah 3 (tiga) laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota, terealisasi 3 (tiga) laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten (100%)

2.1.3.3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program pengelolaan barang milik daerah hanya didukung 1 (satu) kegiatan dengan nama yang sama yaitu pengelolaan barang milik daerah

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang/aset milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan penatausahaan barang/aset milik daerah meliputi penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang/aset milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dilakukan pencatatan. Proses inventarisasi baik berupa pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses penatausahaan dan inventarisasi diperlukan untuk pelaporan barang milik daerah yang dilakukan

oleh kuasa pengguna anggaran, pengguna anggaran, dan pengelola barang.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A. Indikator ini dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang/aset milik daerah sehingga dalam pelaksanaannya terdapat kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang/aset daerah.

Target indikator persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan BMD kategori A adalah sebesar 88% terealisasi sebesar 88% sehingga capaian 100%. Realisasi ini dihitung dari jumlah perangkat daerah yang memiliki kategori A dalam pengelolaan BMD dibagi jumlah perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sleman dikali 100%. Kategori tertib administrasi pengelolaan BMD adalah penyampaian dokumen administrasi pengelolaan BMD tepat waktu. Dokumen tersebut adalah berita acara rekonsiliasi bulanan, laporan semester 1 (satu) tahun n, laporan semester 2 (dua) tahun 2-1, RKBMD awal, RKBMD perubahan.

Sedangkan total anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.672.941.430,00 terealisasi Rp 5.859.859.033,41 atau sebesar 87,81% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan pengelolaan barang milik daerah didukung dengan 6 (enam) sub kegiatan masing-masing alokasi anggaran, realisasi anggaran dan output yang terealisasi sebagaimana ditampilkan pada lampiran 2. Kelima sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 774.206.000,00 realisasi Rp 392.615.100,00 (50,71%), sedangkan target output adalah 1 (satu) standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah terealisasi 1 (satu) dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah (100%)

- **Penatausahaan Barang Milik Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 277.347.000,00 realisasi Rp 274.733.000,00 (99,05%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan penatausahaan barang milik daerah, terealisasi 1 (satu) laporan penatausahaan barang milik daerah (100%)
- **Pengamanan Barang Milik Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 898.665.000,00 realisasi Rp 874.691.533,00 (97,33%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil pengamanan barang milik daerah, terealisasi 1 (satu) laporan hasil pengamanan barang milik daerah (100%).
- **Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.664.957.930,00 realisasi Rp 3.464.176.992,77 (94,52%), sedangkan target output adalah 1 (satu) laporan hasil pengamanan barang milik daerah, terealisasi 1 (satu) laporan hasil pengamanan barang milik daerah (100%)



Gambar 2.12 Penyimpanan Barang Milik Daerah Rusak Berat

- **Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 802.354.500,00 realisasi Rp 614.826.007,00 (76,62%), sedangkan target output adalah 1 (satu) Dokumen hasil optimalisassi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, terealisasi 1 (satu) dokumen hasil optimalisassi penggunaan,

pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah (100%)

- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 255.411.000,00 realisasi Rp 238.816.400,00 (93,50%), sedangkan target output adalah 48 (empat puluh delapan) orang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota, terealisasi 48 (empat puluh delapan) orang yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten (100%)

2.1.3.4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program pengelolaan pendapatan daerah hanya didukung satu kegiatan dengan nama kegiatan yang sama dengan nama program. Total anggaran untuk melaksanakan program pengelolaan pendapatan daerah adalah sebesar Rp 19.307.657.525,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.914.875.975,99 atau sebesar 97,67%.

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yaitu bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan serta bidang penagihan dan pengembangan.

Terdapat 2 (dua) indikator yang masing-masing indikator menjadi indikator kinerja masing-masing bidang. Kedua indikator tersebut adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah dan persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Target indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak tahun 2024 mengalami perubahan atas hasil evaluasi dari BPKP, dikarenakan capaian realisasi target tahun 2023 melebihi 100%. Target semula yang tercantum pada renstra untuk tahun 2024 adalah daerah terealisasi sebesar 80,10. Dilakukan perubahan menjadi 84,54. Realisasi hasil perhitungan dari indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak tahun 2024 adalah sebesar 85 sehingga capaian sebesar 100,54%. Indeks diperoleh dari hasil *survey* kepada

pengguna jasa pelayanan pajak daerah dengan responden dipilih secara acak *random sampling*.

Demikian juga dengan indikator persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah mengalami perubahan menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP. Target yang tercantum pada renstra adalah sebesar 8,85% berubah menjadi 22,25%. Terealisasi sebesar 25,58% dari target 22,25% sehingga capaian sebesar 114,96%. Indikator dihitung dari kenaikan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tertuang pada dokumen APBD murni tahun 2024 dibandingkan dengan target pada APBD murni 2023. Adapun capaian sangat signifikan dapat dijelaskan bahwa kondisi perokonomian jauh lebih baik dibanding prediksi pada saat penentuan target yaitu pada saat penyusunan renstra pada tahun 2020. Pada tahun tersebut pandemi covid masih berada pada level yang sangat tinggi, pergerakan ekonomi dan sosial dibatasi, sehingga berpengaruh pada penentuan target penerimaan pajak dan retribusi daerah saat itu.

Kegiatan ini didukung dengan 10 (sepuluh) sub kegiatan.

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 152.774.900,00 realisasi Rp 150.845.327,00 (98,73%), sedangkan target output adalah 2 (dua) dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah, terealisasi 2 (dua) dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah (100%)



Gambar 2.13 Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah dan Evaluasi Capaian dan Konfirmasi Target Retribusi 2025

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 168.199.400,00 realisasi Rp 166.028.072,00 (98,70%), sedangkan target output adalah 8 (delapan) laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, terealisasi 2 (dua) dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah (100%).



Gambar 2.14 Sosialisasi Penyelenggaraan Reklame

- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 589.098.500,00 realisasi Rp 535.385.308,00 (90,88%), sedangkan target output adalah 86 (delapan puluh enam) laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, terealisasi 86 (delapan puluh enam) laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah (100%)
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 354.700.000,00 realisasi Rp 315.609.175,00 (88,97%), sedangkan target output adalah 20.000 obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya, terealisasi 20.000 obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya (100%).
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 457.155.000,00 realisasi Rp 447.173.883,00 (97,81%), sedangkan target output adalah 1 dokumen ketetapan wajib pajak daerah, terealisasi 1 dokumen ketetapan wajib pajak daerah (100%).
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 886.396.650,00 realisasi Rp 840.346.302,00 (94,80%), sedangkan target output adalah 10.000 jenis/layanan dan terealisasi sebanyak 14.669 (147%).
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 476.965.000,00 realisasi Rp 336.506.916,00 (70,55%), sedangkan target output adalah 3800 penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, terealisasi 4200 penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah (110,53%).
- Penagihan Pajak Daerah
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 13.439.146.000,00 realisasi n target output adalah 1 (satu) dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah terealisasi 1 (satu) dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah (100%).



Gambar 2.15 Intensifikasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

- **Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 60.719.800,00 realisasi Rp 60.473.556,00 (99,59%), sedangkan target output adalah 500 (lima ratus) dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah, terealisasi 510 (lima ratus sepuluh) dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah (102%).
- **Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 2.596.603.375,00 realisasi Rp 2.511.188.274,00 (96,71%), sedangkan target output adalah 500 (lima ratus) dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah terealisasi 516 (lima ratus enam belas) dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian pengawasan pajak daerah (103,2%)
- **Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah**
Anggaran dari sub kegiatan ini adalah sebesar Rp 125.898.900,00 realisasi Rp 125.765.933,00 (99,89%), sedangkan target output adalah 12 (dua belas) laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi Daerah, terealisasi 12 (dua belas) laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah (100%)



Gambar 2.16 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Jurusita Pajak Kabupaten Sleman

Adapun permasalahan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD diantaranya:

- 1) Sistem informasi dari pemerintah pusat dibangun secara bertumbuh sehingga dalam perjalanannya perlu upaya pendampingan pada setiap tahapannya. Hal ini juga menjadikan kekhawatiran terhadap sistem terkait tahapan-tahapan selanjutnya, yaitu tahapan rencana umum pengadaan, tahap penatausahaan dan tahapan pelaporan. Penyesuaian terhadap sistem baru ini membutuhkan upaya besar untuk dapat mengaplikasikannya dengan kemungkinan resiko yang menyertai, diantaranya adalah resiko lebih lambatnya waktu yang dicapai serta validitas data yang tersaji.
- 2) Adanya keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah pusat sehingga perlu penggalian potensi sumber pendapatan asli daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik.
- 3) Adanya peraturan baru terkait pengelolaan keuangan daerah antara lain tentang pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sehingga diperlukan upaya untuk menginternalisasi peraturan tersebut kepada perangkat daerah agar terdapat keseragaman administrasi dalam hal

pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pelaporan keuangan daerah antar perangkat daerah.

- 4) Adanya kebijakan desentralisasi pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka memperlancar jalannya pemerintahan. Hal ini tentu saja harus diimbangi dengan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen penyusunan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah secara tertib. Periodisasi penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah harus diatur secara tepat sehingga TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memiliki waktu yang cukup untuk menyusun prioritas kebutuhan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- 5) Realisasi fisik dan keuangan di beberapa kegiatan tidak berjalan sesuai rencana dan terakumulasi di akhir tahun anggaran serta penyerapan anggaran kurang dapat berjalan optimal walaupun sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan adanya kebijakan penyerapan anggaran yang dikaitkan dengan tunjangan penghasilan pegawai dapat mendorong masing-masing koordinator kegiatan untuk menepati jadwal penyerapan sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 6) Kapasitas dan kapabilitas pegawai dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sepenuhnya berbasis akrual serta dalam hal pengelolaan keuangan dan aset masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan aset.
- 7) Perencanaan program dan kegiatan belum menggunakan data/informasi yang akurat sebagai dasar penentuan kebutuhan dimasa datang.

- 8) Program dan kegiatan belum semuanya didukung dengan SOP sehingga berpotensi menimbulkan masalah pengendalian.
- 9) Tuntutan peningkatan kualitas layanan baik dari masyarakat maupun instansi lain mengharuskan Badan keuangan dan Aset Daerah senantiasa melakukan perbaikan mutu produk layanan baik layanan kepada wajib pajak maupun layanan kepada perangkat daerah secara terus menerus.
- 10) Inkompetensi secara teknologi, karena kesuksesan pengembangan sistem informasi tidak hanya bergantung pada penggunaan alat atau teknologinya saja, tetapi juga manusia sebagai perancang dan penggunaannya.

Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Program pada Urusan Keuangan Tahun 2024

No.	Program / Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Perbaikan Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program penunjang urusan kebutuhan administrasi perkantoran					
	a. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		100	100
	b. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100		100	100
2.	Program pengelolaan keuangan daerah					
	a. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	%	100		100	100
	b. Persentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	%	100		100	100
	c. Persentase ketepatan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	%	100		100	100
3.	Program pengelolaan barang milik daerah					
	Persentase perangkat daerah yang tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah (BMD) kategori A	%	88		88	100
4.	Program pengelolaan pendapatan daerah					
	a. Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	%	8,85	22,5	25,58	113,68
	b. Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	Indeks	80,01	84,54	85	100,54

BAB III

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

3.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan terdiri dari indikator kinerja kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil.

3.1.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Output*

Indikator kinerja kunci (IKK) *output* yang diampu Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota
Berdasarkan data pada rekap karet inventaris barang tahun 2024 total jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah adalah sebanyak 6.210 unit dengan nilai buku sebesar Rp 1.442.444.185.473,80.
- b. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat adalah sejumlah gedung yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu 6.210 unit. Adapun biaya pemeliharaan dibebankan pada masing-masing perangkat daerah pengguna barang.
- c. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah
Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sleman tidak melakukan pengadaan tanah.

3.1.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK) *Outcome*

Indikator kinerja kunci (IKK) *output* yang diampu Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan
Rasio menggambarkan alokasi belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan Kabupaten Sleman terhadap APBD tahun 2024. Berdasarkan

Permendagri No 18 tahun 2020 rumus perhitungan rasio diperoleh dari perhitungan jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi jumlah realisasi APBD dikalikan 100%. Belanja Pegawai terdiri gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga dan tunjangan fungsional. Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan adalah sebesar Rp 884.142.244.714,15. Sedangkan realisasi APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.287.531.282.051,45 sehingga diperoleh rasio sebesar 26,89%.

b. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rumus perhitungan rasio PAD adalah jumlah realiasi PAD dibagi jumlah realisasi pendapatan APBD dikalikan 100 persen. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai sendiri pembangunan daerahnya. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *unaudited* tahun 2024, jumlah penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp 1.184.134.311.436,95 sedangkan APBD realisasi adalah sebesar Rp 3.287.531.282.051,45 sehingga diperoleh rasio sebesar 36,64%.

c. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum dikurangi Transfer *Expenditures*

Rumus perhitungan rasio adalah jumlah realisasi belanja urusan pemerintahan dikurangi transfer *expenditures* (belanja transfer) dibagi jumlah belanja APBD dikalikan 100%. Belanja urusan pemerintahan diperoleh dari total belanja dikurangi belanja modal. Berdasarkan dari data laporan keuangan tahun 2024 *unaudited* jumlah belanja urusan pemerintahan adalah sebesar Rp 2.991.754.296.573 dan belanja transfer adalah sebesar Rp 490.003.932.239,00 sedangkan realisasi belanja APBD adalah sebesar Rp 3.287.531.282.051,45 sehingga diperoleh rasio sebesar 85,10%.

d. Opini Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Pada indikator ini opini WTP yang ke 13 (tiga belas) diperoleh atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2023 sebagaimana yang

tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 03B/LHP/XVIII.YOG/03/2024 tanggal 4 Maret 2024.

e. Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD

Indikator ini dihitung berdasarkan rumus nilai absolut dari total belanja dalam realisasi dibagi total belanja APBD dikurangi satu dikali 100%. Berdasarkan LRA tahun 2024 *unaudited* realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.287.531.282.151,45 sedangkan jumlah APBD adalah sebesar Rp 3.434.915.639.694,00. Berdasarkan angka tersebut diperoleh deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD sebesar (4,29) %.

f. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD

Rasio ini dihitung berdasarkan rumus nilai absolut dari total realisasi PAD dibagi target PAD yang tertuang pada APBD dikurangi 1 dikalikan 100%. Berdasarkan LRA tahun 2024 *unaudited* realisasi PAD adalah sebesar Rp 1.184.134.311.436,95 sedangkan PAD yang tertuang pada APBD adalah sebesar Rp 1.199.635.489.534,00. Berdasarkan data tersebut maka deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD adalah sebesar (1,29)%.

g. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya

Rasio dihitung dari nilai realisasi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dibagi total belanja anggaran tahun sebelumnya dikali 100%. Realisasi SiLPA tahun 2024 berdasarkan dokumen LRA tahun 2024 *unaudited* adalah sebesar Rp 153.442.690.235,02 sedangkan total belanja anggaran tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 3.281.307.765.874,00 sehingga diperoleh rasio sebesar 4,68%.

h. Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan Dapat Diakses di Website Pemda

Rumus perhitungan rasio ini adalah realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di *website* pemda dibagi anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di *website* pemda dikali 100%. Alokasi anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di *website* pemda tahun 2024 adalah sebesar Rp 34.420.120.494,00 sedangkan realisasi sebesar Rp 33.163.677.990,00 sehingga rasio adalah sebesar 96,34%.

i. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah

Rumus perhitungan adalah jumlah dokumen yang dipublikasikan di *website* pemda dibagi total jumlah dokumen yang telah dirinci dikali 100%. Terkait akses publik, saat ini seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Sleman telah memiliki *website* yang tiap tahunnya dilakukan evaluasi oleh komisi informasi publik. Data – data keuangan diantaranya DPA, RKA, LRA, Perda APBD dan Perbup APBD menjadi indikator pengelolaan informasi publik.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2024 (Indikator Kinerja Kunci Keluaran dan Indikator Kinerja Kunci Hasil)

NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	IKK OUTCOME	RUMUS PERHITUNGAN
1	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota	6210		
2	Jumlah bangunan gedung Negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	6210		
3	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0m ²		
4			Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah realisasi belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan dibagi jumlah realisasi APBD dikalikan 100% 884.142.244.714,15:3.287.531.282.051,45 x 100%=26,89%,
5			Rasio PAD	Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah realisasi pendapatan pada APBD 100% 1.184.134.311.436,95 : 3.232.073.129.8321 x 100%=36,64%
6			Rasio belanja Urusan Pemerintahan Umum dikurangi transfer expenditures	Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures dibagi jumlah realisasi belanja APBD dikalikan 100% 2.501.750.364.334,01: 3.287.531.282.051,45 x 100%=85,10%
7			Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan 14 kali WTP

NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN KINERJA	IKK OUTCOME	RUMUS PERHITUNGAN
8			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi dibagi total belanja APBD dikurangi satu dikalikan 100% $(3.287.531.282.051,45 : 3.484.915.639.694) - 1 \times 100\% = 4,29\%$
9			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu dikalikan 100% $(1.184.134.311.436,95 : 1.184.134.311.436,95) - 1 \times 100\% = 1,29\%$
10			Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar aset tetap? Ya 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? Ya 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? Ya, untuk aset baru. Sedangkan inventarisasi secara keseluruhan dilaksanakan per 5 tahun
11			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA dibagi total belanja anggaran tahun sebelumnya dikalikan 100% $153.442.690.235,02 : 3.281.307.765.874,00 \times 100\% = 4,68\%$
12			Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda dibagi anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda dikalikan 100% $33.163.677.990,00 : 34.420.120.494,00 \times 100\% = 96,34\%$
14			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda dibagi total jumlah dokumen yang telah dirinci dikalikan 100% $12 : 12 \times 100\% = 100\%$

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DANA KEISTIMEWAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, provinsi DIY mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini adalah keistimewaan hukum yang dimiliki DIY berdasarkan sejarah dan asal usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Dalam pelaksanaannya, keistimewaan Jogja didukung oleh dana keistimewaan yang pelaksanaannya disebar ke 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Kabupaten Sleman sebagai bagian dari DIY memegang peranan dalam menyukseskan Keistimewaan Yogyakarta. BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berperan dalam memastikan dan memproses ketersediaan dana keistimewaan yang dibutuhkan perangkat daerah.

Pada pelaksanaannya secara operasional ketugasan BKAD pada tahun 2024 terwadahi pada Urusan Sekretariat Daerah melalui Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan dengan anggaran sebesar Rp 78.540.000. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 78.268.526 terserap 99,65%. Adapun target output dari sub kegiatan tersebut adalah 1 (satu) laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan, realisasi output 100%.

BAB V

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ TAHUN ANGGARAN 2023

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD mendapatkan laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya DPRD memberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti Bupati. Berikut rekomendasi dan tindak lanjut terkait rekomendasi bidang keuangan.

- **Rekomendasi:** Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kersipan perlu lebih diperhatikan (diprioritaskan) mengingat pengarsipan menjadi salah satu aktivitas krusial.

Yang dilaksanakan tahun 2024:

Telah dialokasikan anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 10.804.885.001,00

- **Rekomendasi:** Alokasi anggaran untuk bidang kersipan bisa lebih diperhatikan.

Yang dilaksanakan tahun 2024:

Telah dialokasikan anggaran untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp 10.804.885.001,00

- **Rekomendasi:** Mengupayakan kemandirian daerah-sekaligus juga kemandirian fiskal-agar mampu mempunyai ruang gerak anggaran yang lebih besar, untuk memunculkan program dan kegiatan yang lebih produktif untuk mencapai kesejahteraan di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan

memperhatikan pola pembangunan yang lebih merata sehingga memperkecil *gap* kesenjangan ekonomi dan sosial antar warga.

Yang dilaksanakan tahun 2024:

Tahun 2024 total PAD yang ditargetkan adalah sebesar Rp 1.083.331.902.102 meningkat sebesar Rp 22.470.785.542 dari tahun 2023. Pada APBD perubahan target PAD naik menjadi Rp 1.199.635.489.345 atau naik sebesar 10,16% dibanding target tahun 2023. Sedangkan realisasi PAD 2024 adalah sebesar Rp 1.130.157.860.240,59 atau sebesar 98,71% dari target.

- **Rekomendasi:** Perlu ada kajian potensi pajak dan retribusi yang detail untuk tiap jenis pajak dan retribusi agar didapati informasi potensi pajak yang akurat.

Yang dilaksanakan tahun 2024:

Telah dibuat kajian terkait potensi penerimaan Stadion Maguwoharjo. Sedangkan terkait kajian pajak daerah tidak disusun

- **Rekomendasi:** Perlu diidentifikasi dan diverifikasi potensi-potensi pendapatan dari pemanfaatan aset-aset daerah yang dikelola oleh UPT-UPT.

Yang dilaksanakan tahun 2024:

Telah dibuat kajian terkait potensi penerimaan UPT Stadion Maguwoharjo

- **Rekomendasi:** Perlu dilakukan koordinasi antara Bank Sleman dan Bank Syariah, terkait pembagian nasabah ASN Sleman dan bunga pinjaman Bank Syariah diperingan.

Yang dilaksanakan tahun 2024:

Telah dilaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal BPRS bersama bagian hukum dan bagian perekonomian

- **Rekomendasi:** Mengupayakan efektifitas anggaran untuk memprioritaskan alokasi pada belanja yang mempunyai dampak langsung pada masyarakat atau yang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi di Sleman, dengan menekan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dan memperbesar belanja modal hingga 40% dari APBD di tahun fiskal.

Yang dilaksanakan tahun 2024:

Alokasi Belanja infrastruktur publik sebesar Rp 446.151.568.838 t alokasi belanja infrastruktur publik sebesar Rp 446.151.568.838 atau sebesar 15,78% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau belanja transfer. Dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp 416.226.558.593 atau sebesar 83,29%

- **Rekomendasi:** LKPJ seharusnya dipaparkan lebih rinci penjelasan tentang Investasi Pemerintah Daerah sehingga lebih informatif. Rincian informasi yang perlu disajikan antara lain:
 - a) BUMD yang mendapat penyertaan modal
 - b) Total investasi yang telah dilakukan sampai dengan tahun pertanggungjawaban; termasuk total investasi yang ditanamkan ke masing-masing BUMD
 - c) Jumlah hasil investasi yang diterima oleh Pemkab pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya atas investasi yang sudah ditanamkan.

Yang dilaksanakan tahun 2024:

- a. BUMD yang mendapat penyertaan modal pada tahun 2024 adalah
 - Bank BPD DIY Sebesar Rp 10.000.000
 - PD BPR Bank Sleman Rp 10.000.000
 - PDAM sebesar Rp 9.100.000.000
- b. Total investasi yang telah dilakukan sampai dengan tahun pertanggungjawaban ke masing-masing BUMD sebagai berikut:
 - Bank BPD DIY sebesar Rp 402.513.000.000
 - PD BPR Bank Sleman sebesar Rp 207.716.276.000
 - PDAM Sleman sebesar Rp 168.659.323.537
 - BUKP sebesar Rp 2.489.034.722
 - PT BPRS Sleman sebesar Rp 16.125.000.000
- c. Jumlah hasil investasi yang diterima oleh Pemkab adalah:
 - Bank BPD DIY, sebesar Rp 366.702.396.905
 - PD BPR Bank Sleman, sebesar Rp 122.414.753.951,50
 - PDAM sebesar Rp 11.380.596.873,87
 - BUKP sebesar Rp 4.560.132.213,98
 - PT BPRS Sleman sebesar Rp 460.341.340
- **Rekomendasi:** Persentase penduduk miskin. Pemenuhan target RPJMD persentase penduduk miskin di tahun 2023 dengan capaian 97,47% lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 sebesar 97,93% atau mengalami penurunan - 0,46% menjadi gambaran upaya penurunan penduduk miskin di Kabupaten Sleman mengalami perlambatan. Dengan dipayungi Perda Penanggulangan Kemiskinan diharapkan adanya upaya percepatan penurunan angka kemiskinan

yang lebih terpadu dan komprehensif sehingga program-programnya lebih tepat sasaran.

Yang dilaksanakan tahun 2024

Alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 446.677.250.173 terealisasi sebesar Rp 430.661.793.546 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas PMK:

- Program Administrasi Pemerintah Desa sebesar Rp 7.873.608.045 realisasi sebesar Rp 7.531.010.811
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat sebesar Rp 1.162.830.405 realisasi sebesar Rp 1.118.720.619

2. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan:

- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Rp 362.155.000 terealisasi sebesar Rp 358.093.255
- Program Penyediaan dan Prasarana Pertanian sebesar Rp 6.982.956.800 realisasi sebesar Rp 6.258.215.785
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Rp 1.030.947.750 realisasi sebesar Rp 1.018.565.819
- Program Penyuluhan Pertanian Rp 3.119.426.000 realisasi sebesar Rp 3.000.084.742

3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Program Pemberdayaan UMKM sebesar Rp 309.249.100 realiasi sebesar Rp 246.694.563
- Program Pengembangan UMKM Rp 11.347.720.000 realisasi sebesar Rp 10.402.555.415

4. DPUPKP

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Rp 8.861.201.300 realisasi sebesar Rp 8.717.201.848
- Program Kawasan Permukiman Rp 15.719.120.750 realisasi sebesar Rp 15.039.413.285

5. Dinas Sosial

- Program Rehabilitasi Sosial Rp 11.536.111.130 realisasi sebesar Rp 10.963.067.327
- Program Perlindungan dan jaminan Sosial Rp 17.035.324.600 realisasi sebesar Rp 16.364.068.929

6. Dinas Pendidikan, melalui Program Pengelolaan Pendidikan Rp 254.270.903.409 realisasi sebesar Rp 242.696.588.079

7. Dinas Lingkungan Hidup, melalui Program Pengelolaan Sistem Air Limbah Rp 10.834.167.100 realisasi sebesar Rp 10.549.205.063

8. Dinas Dukcapil:

- Program Pencatatan Sipil Rp 193.079.400 realisasi sebesar Rp 184.820.027
- Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Rp 373.875.400 realisasi sebesar Rp 363.460.266
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan Rp 36.400.000 realisasi sebesar Rp 33.557.700

9. Dinas Kesehatan, melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp 60.391.722.884 realisasi sebesar Rp 58.552.436.927

10. Dinas Tenaga Kerja:

- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Rp 2.291.510.400, realisasi sebesar Rp 2.215.587.842
- Program Hubungan Industrial Rp 211.110.000 realisasi sebesar Rp 192.062.500
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Rp 432.219.200 realisasi sebesar Rp 388.600.855

Sedangkan dana bergulir yang telah tersalur ke masyarakat adalah sebesar Rp 30,93 M

BAB VI

PENUTUP

Laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman merepresentasikan capaian penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Sleman. Laporan ini meliputi pelaksanaan kegiatan BKAD baik sebagai Perangkat Daerah maupun sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Sampai dengan bulan Desember 2024 program dan kegiatan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sleman secara keseluruhan telah dilaksanakan. Secara fisik kegiatan yang berkaitan dengan tugas BKAD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, kegiatan di kesekretariatan dan proses administrasi untuk setiap kegiatan dapat dikatakan berjalan lancar. Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang kurang optimal capaian fisiknya karena beberapa kendala yang mendasar. Hal ini menyebabkan penyerapan pada kegiatan tertentu yang kurang optimal capaian fisiknya juga kurang maksimal. Sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi keuangan BKAD adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Realisasi Keuangan BKAD Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	2.989.692.842.567,00	2.968.976.3114.801,68	99,31
2	Belanja	638.044.093.942,00	624.206.792.706,41	97,83
3	Penerimaan Pembiayaan	231.942.509.862,00	231.942.509.861,75	100,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	29.100.000.000,00	29.100.000.000,00	100,00

Guna meningkatkan capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, data pencapaian kegiatan baik itu capaian fisik maupun penyerapan anggaran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga sebagai salah satu acuan dalam rangka perbaikan perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan kinerja BKAD di masa datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumen Pendukung Indikator
Kinerja Kunci

Lampiran 2

Laporan Pengukuran Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun Anggaran 2024

Lampiran 3

Data Inovasi Perangkat Daerah

Lampiran 4

Data Prestasi Perangkat Daerah

Lampiran 1

Dokumen Pendukung Indikator
Kunci



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦧꦢꦤꦏꦺꦴꦗꦁꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦢꦤꦺꦴꦫꦤ꧀

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

**JUMLAH BELANJA PEGAWAI DILUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

No.	Uraian	Realisasi
1.	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Rp 884.142.244.714,15

Sleman, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman



Dra. TINA HASTANI, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700429 199603 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦥꦼꦩꦶꦂꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦨꦢꦏꦺꦴꦁꦤꦒꦤ꧀ꦢꦤꦱꦺꦠꦢꦤꦺꦫꦃ

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

JUMLAH APBD DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	2.593.270.627.441,00	2.487.581.238.634,01	95,92
2.	Belanja Modal	328.562.346.282,00	295.776.985.478,44	90,02
3.	Belanja Tak Terduga	19.915.622.161,00	14.169.125.700,00	71,15
4.	Belanja Transfer	493.167.043.810,00	493.167.043.810,00	99,36
Jumlah Belanja		3.434.915.639.694,00	3.287.531.282.051,45	95,71

Sleman, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman



Dra. TINA HASTANI, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700429 199603 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦧꦢꦤꦏꦺꦴꦁꦤꦁꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦢꦤꦼꦫꦤ꧀

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

JUMLAH PAD DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah	869.022.775.000,00	851.515.175.943,00	97,99
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	233.738.500.268,00	250.855.652.854,00	107,32
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	42.893.103.269,00	43.658.935.550,82	101,79
4.	Lain-lain PAD yang Sah	53.981.110.997,00	38.104.547.089,13	70,59
Jumlah PAD		1.199.635.489.534,00	1.184.134.311.436,95	98,71

Sleman, 31 Januari 2025
Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman

Dra. TINA HASTANI, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700429 199603 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦨꦒꦏꦼꦸꦁꦤꦏꦁꦧꦼꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦢꦁꦢꦼꦫꦲꦏꦼ

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274)) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

ASSETS MANAGEMENT

No	Uraian	Hasil	Sumber Data
1.	Apakah ada daftar aset tetap?	Ya/Tidak	Ya
2.	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ya/Tidak	Ya
3.	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ya/Tidak	Ya, untuk pembelian baru
4.	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan?	Ya/Tidak	Ya

Lampiran Surat:

1. Daftar aset tetap (lampirkan data pendukungnya);
2. Manual untuk menyusun daftar aset tetap (lampirkan data pendukungnya);
3. Proses inventarisasi aset tahunan (lampirkan data pendukungnya);
4. Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran (lampirkan data pendukungnya).

Sleman, 31 Januari 2025

Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman

Dra. TINA HASTANI, M.M.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700429 199603 2 006

No	Jenis Dokumen	Alamat Portal	Perangkat Daerah	Keterangan
11.	LKPD yang sudah diaudit	https://slemankab.go.id/transparasi-pengelolaan-keuangan-daerah/	Dinas Kominfo	
12.	Opini atas LKPD	https://slemankab.go.id/transparasi-pengelolaan-keuangan-daerah/	Dinas Kominfo	

Sleman, 31 Januari 2025
 Plt. Kepala Badan Keuangan
 dan Aset Daerah
 Kabupaten Sleman



Dra. TINA HASTANI, M.M.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19700429 199603 2 006

Lampiran 2

Laporan Pengukuran Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun Anggaran 2024

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Badan Keuangan dan Aset Daerah	120.983.024.149,00	2.252.852.490,00	116.206.691.269,00	96,05	-	-		-	
Sekretariat Daerah	78.540.000,00	271.474,00	78.268.526,00	99,65	-	-		-	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	78.540.000,00	271.474,00	78.268.526,00	99,65	-	-		-	
<i>Prosentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah</i>	-	271.474,00	-	-	%	100		100	100%
<i>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>	78.540.000,00		78.268.526,00	99,65	Laporan	3		3	100%
<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dana Keistimewaan</i>	78.540.000,00		78.268.526,00	99,65	-	-		-	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	-		-	-	Laporan	4		4	100%
Keuangan	120.904.484.149,00	2.452.581.016,00	116.128.422.743,00	96,05	-				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.645.807.650,00	1.566.405.950,00	91.146.600.232,00	96,30	-				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-		-	-	%	100		100	100%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja									
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	60.273.935,00	0,00	59.399.923,00	98,55	-				
<i>Prosentase ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah</i>					%	100%		100%	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.343.720,00	0,00	43.047.995,00	99,32	-				100%
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	dokumen	3		3	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.762.440,00	0,00	1.736.143,00	98,51				-	-
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.091.600,00	0,00	2.002.912,00	95,76				-	-
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.349.900,00	0,00	2.315.355,00	98,53				-	-
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.274.900,00	0,00	1.950.181,00	85,73				-	-
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.451.375,00	0,00	8.347.337,00	98,77				-	-
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				Laporan	7		7	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.556.557.201,00	55.000.000,00	33.650.957.424,00	94,64					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.889.834.001,00	0,00	33.045.124.535,00	94,71					

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				Orang/bulan	90		90	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	582.360.000,00	55.000.000,00	522.440.000,00	89,71					
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84.363.200,00	0,00	83.392.889,00	98,85					
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	Laporan	2		2	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.169.573.000,00	119.000.000,00	1.006.439.931,00	86,05					
Prosentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-		-	-	%	100%		100%	100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.169.573.000,00	119.000.000,00	1.006.439.931,00	86,05					
Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	-		-	-	dokumen	2		2	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.512.973.100,00	290.000.000,00	2.065.109.895,00	82,18				-	-
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	-		-	-	%	90%		90%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.087.600,00	13.000.000,00	57.974.830,00	74,24				-	-
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-		-		paket	6		6	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	636.302.500,00	7.000.000,00	575.954.307,00	90,52				-	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-		-		paket	1		1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	755.627.000,00	100.000.000,00	645.051.483,00	85,37				-	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-		-		paket	1		1	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000,00	120.000.000,00	229.314.382,00	65,52				-	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-		-		paket	1		1	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	91.518.000,00	0,00	89.175.890,00	97,44					
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-		Laporan	1		1	100%
Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.438.000,00	50.000.000,00	467.639.003,00	77,75					
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-		Laporan	1		1	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.129.636.450,00	70.565.450,00	7.751.489.698,00	95,35				-	
Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	-		-	-	%	90%		90%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.129.636.450,00	70.565.450,00	7.751.489.698,00	95,35				-	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-		-		jenis	14		14	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.636.337.064,00	177.000.000,00	45.313.769.735,00	99,29				-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	126.000.000,00	7.000.000,00	118.001.195,00	93,65				-	

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-		Laporan	12		12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.009.462.064,00	170.000.000,00	44.709.721.546,00	99,33					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-		-		Laporan	12		12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.875.000,00	0,00	486.046.994,00	97,04				-	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-		-		Laporan	12		12	100%
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.204.457.900,00	140.840.500,00	1.923.281.136,00	87,25				-	
Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-		-	-	%	90%		90%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	609.312.000,00	111.840.500,00	415.170.976,00	68,14	-	-		-	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-		unit	37		37	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.550.000,00	14.000.000,00	146.319.756,00	74,82				-	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-		-		unit	12		12	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	775.595.900,00	15.000.000,00	737.942.894,00	95,15					

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-		-		unit	7		7	100%
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	624.000.000,00	0,00	623.847.510,00	99,98				-	
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-		unit kerja	9		9	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.943.035.474,00		3.671.264.494,00	93,11					
1. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	-		-		%	100%		100%	100%
2. Persentase ketetapan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	-		-		%	100%		100%	100%
3. Persentase ketetapan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	-		-		%	100%		100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.324.045.800,00	175.104.066,00	2.103.023.215,00	90,49					
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	115.229.400,00	16.185.081,00	91.050.464,00	79,02					
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi, Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	68.196.000,00	32.495.235,00	35.700.765,00	52,35				-	
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	12.405.000,00	308.250,00	12.096.750,00	97,52					
Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	-		-		dokumen	75		75	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12.405.000,00	1.120.500,00	11.284.500,00	90,97					
Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	-		-		dokumen	75		75	100%
Koordinasi dan Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	31.950.000,00	0,00	28.445.011,00	89,03				-	
Jumlah DPA diverifikasi	-		-		dokumen	75		75	100%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	17.823.000,00	642.000,00	15.593.419,00	87,49				-	
Jumlah DPA diverifikasi	-		-		dokumen	75		75	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.315.806.200,00	900.000,00	1.297.851.097,00	98,64	-	-		-	
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	130.155.700,00	0,00	128.666.107,00	98,86	-	-		-	
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	620.075.500,00	123.453.000,00	482.335.102,00	77,79				-	

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-		dokumen	3		3	100%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	802.685.724,00	5.140.724,00	779.623.612,00	97,13	-	-		-	
Prosentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan Daerah	-		-	-	%	100%		100%	100%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	87.291.000,00	396.600,00	86.370.150,00	98,95				-	
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	207.249.150,00	1.405.000,00	197.052.867,00	95,08	-	-		-	
Jumlah Dokumen Hasil pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	72.890.900,00	409.202,00	70.447.593,00	96,65	-	-		-	
1. Jumlah dokumen hasil Koodinasi,fasilitasi asistensi sinkronisasi,supervisi,monitoring, dan evaluasi Pengelolaan Dana perimbangan dan dana Transfer lainnya	-		-		Dokumen	1		1	100%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	259.624.674,00	1.518.974,00	255.192.700,00	98,29				-	

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemantauan Transaksi non Tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank	-		-		Dokumen	12		12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.130.000,00	450.312,00	45.380.938,00	98,38	-	-		-	
Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran akas daerah.Laporan Aliran kas, dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan realisasi peneimaan dan pengeluaran.	-		-		laporan	12		12	100%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	129.500.000,00	960.636,00	125.179.364,00	96,66	laporan	12		12	100%
Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data peneriman dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait					dokumen	1		1	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.072.722.250,00	9.723.580,00	755.907.407,00	70,47				-	-
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	74.733.000,00	3.439.650,00	71.293.350,00	95,40				-	-

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-		-		laporan	1		1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.	512.411.550,00	4.954.000,00	504.324.587,00	98,42				-	-
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-		dokumen	1		1	100%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	170.987.400,00	840.480,00	170.146.920,00	99,51				-	-
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10.632.000,00	489.450,00	10.142.550,00	95,40				-	-
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-		Orang	182		182	100%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	512.772.111.863,00	13.268.490,00	503.912.076.935,00	98,27				-	-
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	47.540.000,00	13.268.490,00	32.710.260,00	68,81				-	-

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-		-	-	laporan	3		3	100%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	397.985.064.293,00	0,00	397.504.904.212,00	99,88					
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-		laporan	1		1	100%
Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	19.915.622.161,00	0,00	14.169.125.700,00	71,15	-	-		-	-
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-		laporan	1		1	100%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	94.871.425.409,00	0,00	92.238.047.023,00	97,22				-	-
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-		laporan	2		2	100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.007.983.500,00	45.510.401,00	2.253.753.858,00	74,93				-	-
1. Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A	-		-		%	88		88	100%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.672.941.430,00	45.510.401,00	2.395.682.041,00	35,90	%	88		88	100%
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	774.206.000,00	262.475,00	392.615.100,00	50,71				-	-
Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-		dokumen	1		1	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Penatausahaan Barang Milik Daerah	277.347.000,00	2.614.000,00	274.733.000,00	99,06				-	-
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-		laporan	1		1	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah	898.665.000,00	5.666.976,00	874.691.534,00	97,33		-		-	-
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-		laporan	1		1	100%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Brang Milik Daerah	3.664.957.930,00	0,00	3.464.176.993,00	94,52					
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-		laporan	12		12	100%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	802.354.500,00	17.800.950,00	614.826.007,00	76,63				-	-
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	255.411.000,00	19.166.000,00	238.816.400,00	93,50				-	-
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-		orang	48		48	100%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.307.657.525,00	375.215.280,00	18.914.875.976,00	97,97				-	-
1. Persentase PAD terhadap total pendapatan	-		-		%	33		36,56	110,78

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
2. Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	-		-		%	9,49	22,50	25,58	113,68
3. Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	-		-		%	78,90	84,54	85	100,54
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	375.215.280,00	-						
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	152.774.900,00	1.542.824,00	150.845.327,00	98,74		-		-	-
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-		dokumen	2		2	-
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	168.199.400,00	1.046.175,00	166.028.072,00	98,71				-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-		laporan	8		8	-
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	589.098.500,00	53.627.692,00	535.385.308,00	90,88					
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-		laporan	86		86	-
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	354.700.000,00	39.090.825,00	315.609.175,00	88,98				-	
Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	-		-		obyek pajak	20.000		20.000	100%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	457.155.000,00	9.981.117,00	447.173.883,00	97,82				-	

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen penetapan wajib pajak Daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	886.396.650,00	43.508.598,00	840.346.302,00	94,80				-	
Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah.	-		-		jenis/layanan	10.000		14.669	147%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	476.965.000,00	133.658.884,00	336.506.116,00	70,55				-	-
Jumlah penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	-		-		dokumen	3800		4200	111%
Penagihan Pajak Daerah	13.439.146.000,00	12.875.240,00	13.425.553.969,00	99,90				-	-
Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak	-		-		dokumen	1		1	100%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	60.719.800,00	0,00	60.473.556,00	99,59				-	-
Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak Daerah	-		-		dokumen	500		510	102%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.596.603.375,00	79.883.925,00	2.511.188.275,00	96,71				-	-
Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah.	-		-		dokumen	500		516	103%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	125.898.900,00	0,00	125.765.993,00	99,89				-	-
Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	laporan	12		12	100%

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Badan Keuangan dan Aset Daerah	120.983.024.149,00	2.252.852.490,00	116.206.691.269,00	96,05	-	-		-	
Sekretariat Daerah	78.540.000,00	271.474,00	78.268.526,00	99,65	-	-		-	
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	78.540.000,00	271.474,00	78.268.526,00	99,65	-	-		-	
<i>Prosentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah</i>	-	271.474,00	-	-	%	100		100	100%
<i>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</i>	78.540.000,00		78.268.526,00	99,65	Laporan	3		3	100%
<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dana Keistimewaan</i>	78.540.000,00		78.268.526,00	99,65	-	-		-	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	-		-	-	Laporan	4		4	100%
Keuangan	120.904.484.149,00	2.452.581.016,00	116.128.422.743,00	96,05	-				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.645.807.650,00	1.566.405.950,00	91.146.600.232,00	96,30	-				
1. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	-		-	-	%	100		100	100%
2. Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja									
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	60.273.935,00	0,00	59.399.923,00	98,55	-				

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Prosentase ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah					%	100%		100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.343.720,00	0,00	43.047.995,00	99,32	-				100%
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	dokumen	3		3	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.762.440,00	0,00	1.736.143,00	98,51				-	-
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.091.600,00	0,00	2.002.912,00	95,76				-	-
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.349.900,00	0,00	2.315.355,00	98,53				-	-
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.274.900,00	0,00	1.950.181,00	85,73				-	-
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-				dokumen	2		2	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.451.375,00	0,00	8.347.337,00	98,77				-	-
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				Laporan	7		7	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.556.557.201,00	55.000.000,00	33.650.957.424,00	94,64					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.889.834.001,00	0,00	33.045.124.535,00	94,71					
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-				Orang/bulan	90		90	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	582.360.000,00	55.000.000,00	522.440.000,00	89,71					
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-				dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	84.363.200,00	0,00	83.392.889,00	98,85					
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	Laporan	2		2	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.169.573.000,00	119.000.000,00	1.006.439.931,00	86,05					
Prosentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	-		-	-	%	100%		100%	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.169.573.000,00	119.000.000,00	1.006.439.931,00	86,05					
Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian	-		-	-	dokumen	2		2	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.512.973.100,00	290.000.000,00	2.065.109.895,00	82,18				-	-
Prosentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	-		-	-	%	90%		90%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	78.087.600,00	13.000.000,00	57.974.830,00	74,24				-	-
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-		-		paket	6		6	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	636.302.500,00	7.000.000,00	575.954.307,00	90,52				-	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-		-		paket	1		1	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	755.627.000,00	100.000.000,00	645.051.483,00	85,37				-	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	-		-		paket	1		1	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.000.000,00	120.000.000,00	229.314.382,00	65,52				-	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	-		-		paket	1		1	100%
Fasilitas Kunjungan Tamu	91.518.000,00	0,00	89.175.890,00	97,44					
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-		-		Laporan	1		1	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	601.438.000,00	50.000.000,00	467.639.003,00	77,75					
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-		Laporan	1		1	100%
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	8.129.636.450,00	70.565.450,00	7.751.489.698,00	95,35				-	
Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja	-		-	-	%	90%		90%	100%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.129.636.450,00	70.565.450,00	7.751.489.698,00	95,35				-	
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-		-		jenis	14		14	100%
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	45.636.337.064,00	177.000.000,00	45.313.769.735,00	99,29				-	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	126.000.000,00	7.000.000,00	118.001.195,00	93,65				-	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-		Laporan	12		12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.009.462.064,00	170.000.000,00	44.709.721.546,00	99,33					
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	-		-		Laporan	12		12	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.875.000,00	0,00	486.046.994,00	97,04				-	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	-		-		Laporan	12		12	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.204.457.900,00	140.840.500,00	1.923.281.136,00	87,25				-	
Prosentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	-		-	-	%	90%		90%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	609.312.000,00	111.840.500,00	415.170.976,00	68,14	-	-		-	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-		unit	37		37	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	195.550.000,00	14.000.000,00	146.319.756,00	74,82				-	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-		-		unit	12		12	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	775.595.900,00	15.000.000,00	737.942.894,00	95,15					
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-		-		unit	7		7	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	624.000.000,00	0,00	623.847.510,00	99,98				-	
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-		unit kerja	9		9	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.943.035.474,00		3.671.264.494,00	93,11					
1. Persentase dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	-		-		%	100%		100%	100%
2. Persentase ketetapan waktu dalam penatausahaan keuangan daerah	-		-		%	100%		100%	100%
3. Persentase ketetapan waktu penyusunan raperda pertanggungjawaban APBD	-		-		%	100%		100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.324.045.800,00	175.104.066,00	2.103.023.215,00	90,49					
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	115.229.400,00	16.185.081,00	91.050.464,00	79,02					
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi, Penyusunan Perubahan KUA Dan Perubahan PPAS	68.196.000,00	32.495.235,00	35.700.765,00	52,35				-	
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	12.405.000,00	308.250,00	12.096.750,00	97,52					

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	-		-		dokumen	75		75	100%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	12.405.000,00	1.120.500,00	11.284.500,00	90,97					
Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	-		-		dokumen	75		75	100%
Koordinasi dan Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	31.950.000,00	0,00	28.445.011,00	89,03				-	
Jumlah DPA diverifikasi	-		-		dokumen	75		75	100%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	17.823.000,00	642.000,00	15.593.419,00	87,49				-	
Jumlah DPA diverifikasi	-		-		dokumen	75		75	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.315.806.200,00	900.000,00	1.297.851.097,00	98,64	-	-		-	
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	130.155.700,00	0,00	128.666.107,00	98,86	-	-		-	

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	-		-		dokumen	2		2	100%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	620.075.500,00	123.453.000,00	482.335.102,00	77,79				-	
Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-		-		dokumen	3		3	100%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	802.685.724,00	5.140.724,00	779.623.612,00	97,13	-	-		-	
Prosentase ketepatan waktu dalam penatausahaan keuangan Daerah	-		-	-	%	100%		100%	100%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	87.291.000,00	396.600,00	86.370.150,00	98,95				-	
Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	207.249.150,00	1.405.000,00	197.052.867,00	95,08	-	-		-	
Jumlah Dokumen Hasil pengendalian dan penerbitan Anggaran Kas dan SPD	-		-		dokumen	2		2	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	72.890.900,00	409.202,00	70.447.593,00	96,65	-	-		-	
1. Jumlah dokumen hasil Koodinasi,fasilitasi asistensi sinkronisasi,supervisi,monitoring, dan evaluasi Pengelolaan Dana perimbangan dan dana Transfer lainnya	-		-		Dokumen	1		1	100%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	259.624.674,00	1.518.974,00	255.192.700,00	98,29				-	
Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerja sama dan pemantauan Transaksi non Tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank	-		-		Dokumen	12		12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	46.130.000,00	450.312,00	45.380.938,00	98,38	-	-		-	

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran akas daerah.Laporan Aliran kas, dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK) dan laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran.	-		-		laporan	12		12	100%
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	129.500.000,00	960.636,00	125.179.364,00	96,66	laporan	12		12	100%
Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait					dokumen	1		1	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.072.722.250,00	9.723.580,00	755.907.407,00	70,47				-	-
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	74.733.000,00	3.439.650,00	71.293.350,00	95,40				-	-
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	-		-		laporan	1		1	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.	512.411.550,00	4.954.000,00	504.324.587,00	98,42				-	-
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-		-		dokumen	1		1	100%
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	170.987.400,00	840.480,00	170.146.920,00	99,51				-	-
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	10.632.000,00	489.450,00	10.142.550,00	95,40				-	-
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	13.268.490,00	-		Orang	182		182	100%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	512.772.111.863,00		503.912.076.935,00	98,27				-	-

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	47.540.000,00	13.268.490,00	32.710.260,00	68,81				-	-
Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	-		-	-	laporan	3		3	100%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	397.985.064.293,00	0,00	397.504.904.212,00	99,88					
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-		-		laporan	1		1	100%
Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	19.915.622.161,00	0,00	14.169.125.700,00	71,15	-	-		-	-
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-		-		laporan	1		1	100%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	94.871.425.409,00	0,00	92.238.047.023,00	97,22				-	-
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-		laporan	2		2	100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.007.983.500,00	45.510.401,00	2.253.753.858,00	74,93				-	-
1. Persentase OPD yang tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori A	-		-		%	88		88	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.672.941.430,00	45.510.401,00	2.395.682.041,00	35,90	%	88		88	100%
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan Barang Milik Daerah	774.206.000,00	262.475,00	392.615.100,00	50,71				-	-
Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	277.347.000,00	2.614.000,00	274.733.000,00	99,06				-	-
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-		-		laporan	1		1	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah	898.665.000,00	5.666.976,00	874.691.534,00	97,33		-		-	-
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-		-		laporan	1		1	100%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Brang Milik Daerah	3.664.957.930,00	0,00	3.464.176.993,00	94,52					
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		-		laporan	12		12	100%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	802.354.500,00	17.800.950,00	614.826.007,00	76,63				-	-

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	255.411.000,00	19.166.000,00	238.816.400,00	93,50				-	-
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-		-		orang	48		48	100%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	19.307.657.525,00	375.215.280,00	18.914.875.976,00	97,97				-	-
1. Persentase PAD terhadap total pendapatan	-		-		%	33		36,56	110,78
2. Persentase peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	-		-		%	9,49	22,50	25,58	113,68
3. Indeks kepuasan terhadap layanan pajak daerah	-		-		%	78,90	84,54	85	100,54
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	375.215.280,00	-						
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	152.774.900,00	1.542.824,00	150.845.327,00	98,74		-		-	-
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	-		-		dokumen	2		2	-

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	168.199.400,00	1.046.175,00	166.028.072,00	98,71				-	-
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-		-		laporan	8		8	-
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	589.098.500,00	53.627.692,00	535.385.308,00	90,88					
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-		-		laporan	86		86	-
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	354.700.000,00	39.090.825,00	315.609.175,00	88,98				-	
Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	-		-		obyek pajak	20.000		20.000	100%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	457.155.000,00	9.981.117,00	447.173.883,00	97,82				-	
Jumlah Dokumen penetapan wajib pajak Daerah	-		-		dokumen	1		1	100%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	886.396.650,00	43.508.598,00	840.346.302,00	94,80				-	
Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah.	-		-		jenis/layanan	10.000		14.669	147%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	476.965.000,00	133.658.884,00	336.506.116,00	70,55				-	-

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	-		-		dokumen	3800		4200	111%
Penagihan Pajak Daerah	13.439.146.000,00	12.875.240,00	13.425.553.969,00	99,90				-	-
Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak	-		-		dokumen	1		1	100%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	60.719.800,00	0,00	60.473.556,00	99,59				-	-
Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan Pajak Daerah	-		-		dokumen	500		510	102%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.596.603.375,00	79.883.925,00	2.511.188.275,00	96,71				-	-
Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah.	-		-		dokumen	500		516	103%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	125.898.900,00	0,00	125.765.993,00	99,89				-	-
Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	laporan	12		12	100%

Uraian	Keuangan				Indikator Kinerja Program / Keluaran (Output) Kegiatan / Sub Kegiatan				
	Anggaran	Efisiensi	Realisasi	Capaian	Satuan	Target	Perubahan Target	Realisasi	Capaian
Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran akas daerah.Laporan Aliran kas, dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) dan laporan hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran.					laporan	12		6	60%

Lampiran 3

Data Inovasi Perangkat Daerah

**DATA INOVASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

Nama Inovasi	Inisiator/Inventor	Instansi
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	Kepala BKAD Kab Sleman	BKAD Kab Sleman

Lampiran 4

Data Prestasi Perangkat Daerah

**DATA PRESTASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024**

Jenis Prestasi	Pemberi Penghargaan	Prestator
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Urusan Keuangan	-	-